DINAMIKA SEJARAH POLITIK NU : STUDI TENTANG HUBUNGAN NU DAN NEGARA PADA MASA DR. KH. IDHAM CHALID TAHUN 1956-1984 M

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam

Oleh :

Atifatur Rohmah

NIM. A92215075

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : ATIFATUR ROHMAH

NIM : A92215075

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 31 Desember 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL 20
28FDFAFF589998691
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Atifatur Rohmah

A92215075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal 31 Desember 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. H. Imam Ghazali Said, MA

NIP. 196002121990031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus

Pada tanggal 07 Januari 2019

Ketua / Penguji I

Dr. H. Imam Ghazali Said, MA
NIP. 196002121990031002

Penguji II

Drs. H. Abdul Aziz Medan, M. Ag
NIP. 195509041985031001

Penguji III

Muhammad Khodafi, M. Si
NIP. 197211292000031001

Sekretaris / Penguji IV

Dwi Susanto, M.A
NIP. 197712212005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Agus Aditoni, M. Ag
NIP. 196210021992031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Atifatur Rohmah
NIM : A92215075
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Sejarah Peradaban Islam
E-mail address : atifaturrohmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

DINAMIKA SEJARAH POLITIK NU : STUDI TENTANG HUBUNGAN NU DAN NEGARA PADA MASA DR. KH. IDHAM CHALID TAHUN 1956-1984 M

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(**Atifatur Rohmah**)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang **"Dinamika Sejarah Politik NU : Studi Tentang Hubungan NU dan Negara Pada Masa Dr. KH. Idham Chalid Tahun 1956-1984 M"** yang meneliti beberapa permasalahan, diantaranya : (1). Bagaimana riwayat hidup dan perjuangan Dr. KH. Idham Chalid sebagai pemimpin NU dan politisi tahun 1956-1984 M ? (2). Bagaimana hubungan NU dan Negara pada masa Dr. KH. Idham Chalid ? (3). Bagaimana analisa kritis terhadap perilaku politik NU dalam politik kebangsaan Indonesia masa KH. Idham Chalid ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sejarah yang melalui beberapa tahapan, yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Dalam tahap Heuristik, penulis mengumpulkan beberapa sumber primer dan semi primer serta sekunder yang ditulis oleh sarjana modern, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan historis dan teori politik behavioralisme yang didefinisikan oleh John B. Watson yang secara rinci menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan model analisa politik atau perilaku politik terhadap Dr. KH. Idham Chalid selaku individu maupun NU secara kelompok.

Dari penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis bahwa : (1). Idham Chalid adalah seorang ulama dan politisi yang sangat berjaya pada masanya. Dalam bidang keagamaan, Idham Chalid dikenal sebagai ulama besar NU dan politisi yang sangat lihai bagi orang NU. (2). NU dibawah kepemimpinan Idham Chalid mampu memainkan perannya sebagai organisasi Islam yang kritis terhadap kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Dengan berpedoman pada tradisi Sunni, NU dan Idham Chalid tetap bisa menegakkan syariat Islam tanpa mengurangi kekuatannya dalam pemerintahan. (3). Dalam berpolitik, NU menganut konsep sunnisme yang lebih mementingkan konsep harmoni dan kestabilan sosial. Di sisi lain, pribadi Idham Chalid yang sangat luwes dan moderat sebagai pemimpin, mampu membawa NU bertahan dalam pemerintahan yang silih berganti dan kabinet yang jatuh bangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This Thesis discusses **"The Dynamics of NU's Political History : A Study of the Relationship of NU and State of the Period of Dr. KH. Idham Chalid in 1956-1984 M"** which examined several problems, including : (1). What is the curriculum vitae and struggle of Dr. KH. Idham Chalid as NU leader and politician in 1956-1984 ? (2). What is the relationship between NU and State at the time of Dr. KH. Idham Chalid ? (3). How is the analysis critical of NU's political behavior and its relation to NU's position in government ?

To answer these problems, the author uses historical methods that go through several stages, namely Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography. In the Heuristic stage, the author collects several primary and semi-primary and secondary sources written by modern scholars, which are then analyzed using the historical approach and behavioralism political theory defined by John B. Watson, which details the problems related to the political analysis model or political behavior towards Dr. KH. Idham Chalid as an individual and NU in groups.

From the research conducted, conclusions can be taken by the author that : (1). Idham Chalid was a scholar and politician who was very successful in his time. In the religious field, Idham Chalid was known as the great NU scholar and the leader of politician who was shrewdly for NU people. (2). NU under the leadership of Idham Chalid was able to play its role as an Islamic law without reducing their strength in government. (3). In politics, NU adheres to the concept of Sunnisme which emphasizes the concept of harmony and social stability. On the other, Idham Chalid who hasvery flexible and moderate as a leader, was able to bring NU to survive in the successive government and the cabinet that had fallen up.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……... i

PERNYATAAN KEASLIAN …… ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……..... iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI …….. iv

TABEL TRANSLITERASI …….. v

HALAMAN MOTTO ……. vi

HALAMAN PERSEMBAHAN …… vii

ABSTRAK …….. viii

KATA PENGANTAR …… x

DAFTAR ISI …… xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …… 1

B. Rumusan Masalah …….. 7

C. Tujuan Penelitian ……..... 8

D. Kegunaan Penelitian …… 9

E. Pendekatan dan Kerangka Teori ……. 10

F. Penelitian Terdahulu …….. 12

G. Metode Penelitian ……... 14

H. Sistematika Pembahasan ……. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : RIWAYAT HIDUP DAN PERJUANGAN DR. KH. IDHAM CHALID

A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan ……. 20

B. Berkenalan dengan Kiai NU, Mengajar di Gontor, dan Kembali ke Kampung Halaman ……. 24

C. Sepak Terjang Berorganisasi …….. 27

D. Meretas Jalur Politik Lewat NU …….. 31

E. Karya-karya dan Penghargaan ……. 40

BAB III : HUBUNGAN NU DAN NEGARA PADA MASA DR. KH. IDHAM CHALID

A. Sejarah Singkat Awal NU ……. 46

B. NU Pada Masa Orde Lama

1. Masa Kemerdekaan …….. 48
2. Masa Demokrasi Liberal …….. 50
3. Masa Demokrasi Terpimpin ……. 59

C. NU Pada Masa Orde Baru …… 70

1. Fusi Partai …….. 76
2. Program P-4 …….. 77
3. Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila ……. 78

D. Hubungan Dan Peran NU Terhadap Negara …….. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : NU DAN POLITIK KEBANGSAAN MASA DR. KH. IDHAM CHALID

A. Kemelut Dalam Tubuh NU …… 85

B. Perilaku Politik NU …… 93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ……. 110

B. Saran …… 112

DAFTAR PUSTAKA …… 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nahdlatul Ulama' (NU) adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 26 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M oleh sejumlah tokoh ulama' tradisional dan usahawan di Surabaya.[1] Pada awal kelahirannya, NU bertujuan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Karena NU lahir dalam suasana keterpurukan, baik secara mental maupun ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kondisi tersebut mendorong kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan wadah organisasi.

Langkah konkrit dari timbulnya orientasi politik NU adalah dengan bergabungnya NU ke dalam *Majelis Islam 'Ala Indonesia* (MIAI) pada tahun 1939 yang merupakan organisasi federal dari beberapa organisasi Islam Indonesia yang dibentuk pada tahun 1937 untuk menggalang kekuatan umat Islam menghadapi penjajah.[2] Keterlibatan NU dalam MIAI membawa perubahan orientasi para pemimpin NU dari persoalan keagamaan dan sosial ke persoalan politik. Ketika MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi

---

[1] Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama Dan Geopolitik : Perubahan Dan Kesinambungan*, (Yogyakarta: Pintal, 2011), 1.

[2] Muhammad Rifai, *KH. Wahab Hasbullah : Biografi Singkat 1888-1971*, (Jogjakarta : Garasi House Of Book, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1943, NU mulai masuk dalam pemerintahan yang di kuasai oleh Jepang. Keikutsertaan NU dalam Masyumi banyak membawa keuntungan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.[3]

Dinamika perjuangan NU baik dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan, bahkan politik tidak bisa lepas dari pengaruh dan arah kepemimpinan yang dibawa oleh ketua umum PBNU. Dinamika kepemimpinan PBNU dari awal berdirinya NU yang di ketuai oleh H. Hasan Dipo (1926-1929), KH. Achmad Nor (1929-1937), KH. Mahfudz Siddiq (1937-1944), KH. Nahrowi Tohir (1944-1951), KH. A. Wahid Hayim (1952-1953), KH. M. Dahlan (1953-1956), Dr. KH. Idham Chalid (1956-1984), dan KH. Abdurrahman Wahid (1984-1999). Tercatat bahwa ketua PBNU pertama sejak berdirinya NU, KH. Idham Chalid lah yang paling lama menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, yaitu selama 28 tahun. Di bawah kepemimpinan KH. Idham Chalid ini, NU banyak berperan aktif dalam perpolitikan masa Orde Lama hingga Orde Baru. Hal ini memunculkan koreksi terhadap kepemimpinan ketua umum PBNU yang sebelumnya dengan kepemimpinan KH. Idham Chalid. Perjuangan NU yang eksis dalam politik praktis juga dipengaruhi oleh kiprah politik KH. Idham Chalid atas berbagai prestasi jabatan yang pernah disandangnya.

KH. Idham Chalid adalah tokoh yang hidup dalam pemerintahan awal kemerdekaan, masa Orde Lama hingga Orde Baru. Pada masa Orde Lama,

[3] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna* (Yogyakarta : LkiS, 1999), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Idham Chalid terkenal dekat dengan Presiden Soekarno. Kedudukannya dalam pemerintahan membawa NU tetap eksis dalam pentas politik Orde Lama. Khususnya dalam menanggapi sistem Demokrasi Terpimpin. Pada masa awal Orde Baru, Idham Chalid yang semula masih dikenal kesetiaannya kepada Soekarno, mampu mempertahankan posisinya dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, KH. Idham Chalid dengan partai NU selalu mendapatkan posisi aman dalam pemerintahan. Dalam menjalankan perannya sebagai ulama dan politisi, beliau dikenal sangat luwes dan menggunakan jalan tengah dalam menanggapi kebijakan pemerintahan. Sikap moderat yang di tanamkan adalah sesuai dengan tradisi Sunni yang berpedoman pada hukum fikih. Beliau adalah seorang ulama dan politisi yang pernah menjadi pucuk pimpinan di lembaga eksekutif, legislatif dan ormas seperti Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR/MPR, dan Ketua Umum PBNU. Beliau juga pernah menjadi pemimpin pada tiga partai politik yang berbeda yaitu Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keterkaitan Idham Chalid dengan NU di mulai pada tahun 1952 ketika ia aktif dalam Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan di bawah NU di Jakarta. Kemudian sebagai ketua PB Ma'arif NU dengan konsentrasi pada penanganan masalah pendidikan di tahun 1952. Pada tahun yang sama, ia diangkat PBNU menjadi Sekretaris Jenderal partai, dan dua tahun kemudian ia terpilih sebagai wakil ketua. Selama masa kampanye pemilu 1955, ia memegang jabatan penting sebagai Ketua Lajnah Pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu).[4] Pada Muktamar ke-21 di Medan, Sumatera Utara tahun 1956, ia terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Perkembangan karirnya sangat mengagumkan mengingat bahwa ia berbeda dari para pengurus PBNU lainnya yang merupakan orang Jawa. Sedangkan ia bukanlah orang Jawa dan merupakan lulusan Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, lembaga yang tidak punya kaitan dengan NU dan banyak dipandang oleh ulama sebagai tulang punggung modernisme islam.[5]

Perjuangan KH. Idham Chalid sebagai ulama dan politisi banyak mendapat pengaruh dari KH. Abdul Wahab Hasbullah, gurunya. Duetnya bersama Rais Am KH. Wahab ini membuatnya mampu membawa NU tahan terhadap badai politik yang menghantam keras pada tahun 1956-1984 M.[6] Ketika NU baru menjadi partai politik pada tahun 1952, kemudian mengikuti pemilu pada tahun 1955, NU berhasil menduduki peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi.

Kiprah NU di pemerintahan melalui eksistensinya dalam pentas politik membawa banyak pengaruh dalam perpolitikan Indonesia. Di satu sisi, NU sebagai organisasi bersikap tegas. Tetapi di lain sisi memang perlu melakukan kompromi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, sehingga hal itu menjadikan sikap politik NU sangat lentur dan fleksibel. Selain itu dalam

---

[4] Lapunu adalah kepanjangan dari Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama, yaitu dewan khusus yang menangani pemilu partai NU yang dibentuk bulan Mei 1953 yang sebelumnya dijabat oleh Saleh Surjaningprodjo tahun 1954. Dikutip dari Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967,* (Yogyakarta : LKiS, 2003), 187.

[5] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid : Guru Politik Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 42.

[6] *Ibid*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merespon kebijakan pemerintah baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, dengan karakter kepemimpinan yang sangat khas, KH. Idham Chalid tetap mendapatkan kepercayaan dari pemerintahan. Masa krisis yang sangat menentukan adalah saat Dekrit Presiden 1959 dengan kembali ke UUD 45 yang berimplikasi pada pergantian sistem Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. NU mengikuti secara kritis pada masa tersebut. Presiden harus tetap bisa dikontrol, harus tetap ada mekanisme *check and balances.* Dengan begitu, NU tetap bisa memperjuangkan tujuannya.

Dengan karakter pemimpin yang menjadikan NU sangat lentur, namun tetap tegas, KH. Idham Chalid membawa NU banyak mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Sehingga pada masa kepemimpinan KH. Idham Chalid, hubungan NU dan Negara semakin tidak dapat dipisahkan. Sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyyah diniyyah*), misi utama NU adalah mengembangkan dan mempertahankan ajaran islam yang menganut salah satu dari empat madzhab.[7] Selain itu, peran NU sebagai wadah aspirasi masyarakat selalu berusaha untuk memperjuangkan kemaslahatan umat. Dengan tetap berpegang pada tradisi Sunni, NU selalu bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Bentuk organisasi keagamaannya mendominasi pengembangan fikih di kalangan NU yang menjadikan pemikiran dan perilaku politik NU sarat dengan muatan-muatan fikih. Keakraban masyarakat NU dengan pola bermadzhab *Syafi'iyah* yang dikenal sebagai imam moderat, menjadikan pola pikir masyarakat NU bersikap

[7] Ridwan, *Paradigma Politik NU : Relasi Sunni-NU dalam pemikiran Politik,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akomodatif terutama dalam merespon persoalan politik dan memberikan treatment kepada kekuasaan.[8]

Dari beberapa uraian di atas, eksistensi dan prestasi politik NU pada pucuk kepemimpinan KH. Idham Chalid sebagai ketua umum PBNU tahun 1956-1984 menjadi menarik untuk dikaji. KH. Idham Chalid mampu mempertahankan posisinya dalam pemerintahan dan membawa NU mempunyai peran cukup besar sejak pemilu 1955 hingga masa Orde Baru. Masa kepemimpinan KH. Idham Chalid dinilai sebagai puncaknya politik NU karena banyak berperan aktif dalam perpolitikan Indonesia khususnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Kondisi tersebut menjadikan Negara tidak dapat dipisahkan dari peran NU. Selain itu, karakter dari KH. Idham Chalid sebagai pemimpin NU memiliki ciri khas dalam berpolitik. Idham Chalid dikenal sangat luwes dan moderat dalam mengambil keputusan. Dalam berpolitik pun ia dikenal sebagai politisi yang lihai.

Peran KH. Idham Chalid di tanah kelahirannya sendiri, Kalimantan juga turut menjadi bagian dari deretan panjang perjuangannya bagi Negara Indonesia. Sebelumnya, Idham Chalid adalah pejuang di daerahnya sendiri. Banyak riwayat organisasi yang diikuti seperti Sermi (Serikat Muslimin Indonesia), SOPIK (Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan), dan ikut melakukan perang gerilya melawan Belanda dengan membentuk Lasykar Saifullah bersama Brigjen Hassaan Basry. Selain itu, ia juga menjadi perwakilan Dewan Daerah Banjar yang menjadi delegasi daerah Kalimantan

[8] *Ibid*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk ke Jakarta. Hingga akhirnya mulai memiliki peran dalam pemerintahan. riwayat perjuangannya di Kalimantan banyak mendapat penghargaan yang begitu besar dari rakyat Kalimantan. Atas pengajuan rakyat Kalimantan, tahun 2011 Idham Chalid ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dan merupakan putra Banjar ketiga yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional setelah Pangeran Antasari dan Hassan Basry.

Untuk membahas lebih dalam mengenai beberapa uraian di atas, kiranya penting beberapa hal disusun untuk menambah wawasan pengetahuan kita mengenai tokoh KH. Idham Chalid dalam perjuangannya sebagai ulama pemimpin NU dan politisi, dan untuk mengetahui hubungan NU dan Negara disamping sikap NU yang sangat kritis terhadap pemerintah, serta karakter kepemimpinan yang diterapkan oleh KH. Idham Chalid dalam berpolitik sehingga ia mampu memimpin NU pada masa Orde Lama hingga Orde Baru tahun 1956-1984. Oleh karena ini, penulis ingin menulis tentang "DINAMIKA SEJARAH POLITIK NU : STUDI TENTANG HUBUNGAN NU DAN NEGARA PADA MASA DR. KH. IDHAM CHALID TAHUN 1956-1984 M".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dan sebagai penentu dalam suatu karya ilmiah. Dengan adanya suatu rumusan masalah, maka akan menghasilkan kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana riwayat hidup dan perjuangan KH. Idham Chalid sebagai pemimpin NU dan politisi tahun 1956-1984 M ?
2. Bagaimana hubungan NU dan Negara pada masa KH. Idham Chalid ?
3. Bagaimana analisa kritis terhadap perilaku politik dalam politik kebangsaan NU masa KH. Idham Chalid ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian yang sistematis diharapkan dapat menemukan jawaban dan penyelesaian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian tersebut ditulis secara rinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui riwayat hidup dan perjuangan KH. Idham Chalid selama menjabat sebagai pemimpin NU dan politisi tahun 1956-1984 M.
2. Untuk mengetahui hubungan dan peran NU terhadap Negara pada masa KH. Idham Chalid.
3. Untuk mengetahui analisa kritis terhadap perilaku politik dalam politik kebangsaan NU masa KH. Idham Chalid, sehingga ia mampu mempertahankan posisinya dalam pemerintahan selama masa Orde Lama hingga Orde Baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan mengingatkan kembali tentang riwayat hidup dan perjuangan KH. Idham Chalid sebagai ulama pemimpin NU dan politisi pada tahun 1956-1984, hingga diajukan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.
   b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahwa hubungan NU dan Negara sangat erat, dan dinamika awal politik dalam sejarah NU bisa terbangun.
   c. Sebagai bahan rujukan dan sumber pada penulisan karya ilmiah sejarah di masa yang akan datang.
2. Praktis
   a. Bagi Akademik

      Sebagai kajian dan sumber pemikiran bagi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya terutama jurusan Sejarah Peradaban Islam yang merupakan lembaga tertinggi formal dalam mempersiapkan calon profesional dalam kajian Sejarah Peradaban Islam di masyarakat yang akan datang. Serta menjadi bahan bacaan dan sumber referensi di perpustakaan Fakultas Adab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Humaniora maupun di perpustakan Universirtas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pembelajaran mengenai riwayat hidup dan perjuangan KH. Idham Chalid sebagai ulama NU sekaligus seorang politisi yang eksistensinya tercatat pada tahun 1956-1984 M sehingga dapat diambil pembelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Pendekatan Dan Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang yang bertujuan untuk menghasilkan bentuk dan proses dari peristiwa sejarah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan kesejarahan yang memiliki ciri khas menekankan aspek diakronisnya sebagai *a science of change*, yaitu pengungkapan sejarah yang menawarkan bukan hanya struktur dan berdialektik dengan melihat realitas sejarah, melainkan mengedepankan pengungkapan kebenaran peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu.[9] Pendekatan historis digunakan penulis untuk mengungkapkan riwayat perjuangan KH. Idham Chalid sebagai ulama NU dan politisi serta perilaku politik NU dalam merespon kebijakan Negara sehingga dapat mengungkap hubungan NU dengan Negara pada tahun 1956-1984 M.

[9] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi sejarah memiliki corak interdisipliner yang membuat keterlibatan disiplin keilmuan lain untuk turut serta memberikan kerangka analisis terhadap fenomena-fenomena sejarah yang dikaji. Keterlibatan disiplin ilmu lain sangat penting dijadikan sebagai alat analisis agar kajian sejarah dapat lebih kritis, komprehensif dan mendalam. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori-teori politik sebagai alat analisisnya. Teori yang diterapkan penulis adalah teori yang didefinisikan oleh John B. Watson yaitu teori *Behavioralisme.* Teori politik *behavioralisme* merupakan salah satu model analisis politik terhadap tingkah laku atau perilaku politik baik individu maupun kelompok sebagai fokus perhatian yang utama.[10] Perhatian utama faham *behavioralisme* terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan perilaku politik. Termasuk bagaimana proses mendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik. Sebagai pendekatan yang fokus pada tingkah laku politik individu dan kelompok, *behavioralisme* juga memperlihatkan hubungan individu dan kelompok.[11]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi fokus *behavioral* tidak semua tingkah laku politik individu atau kelompok melainkan hanya terbatas pada mereka yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat. NU merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat. Sehingga tingkah laku politik yang

[10] *Ibid*, 179.
[11] David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Terj. Setiawan Abadi (Jakarta : LP3ES, 1988), 209-210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya banyak berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat terutama masyarakat Islam. Termasuk pada saat NU eksis dalam pergulatan politik praktis pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang banyak dipengaruhi juga oleh karakter kepemimpinan KH. Idham Calid sebagai ketua umum PBNU pada tahun 1956-1984 M.

Penulis berusaha mengungkap bagaimana hubungan NU dan Negara melalui kiprah politik NU pada masa kepemimpinan KH. Idham Chalid. Selain itu juga untuk mengetahui perilaku politik NU dan KH. Idham Chalid yang memiliki karakter khas dalam memimpin dan membawa NU tetap eksis dalam perpoilitikan dua masa pemerintahan sekaligus, yaitu masa Orde Lama dan Orde Baru, dengan menggunakan teori *behavioralisme* ini.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya duplikasi dan kesamaan dalam pembahasan penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang garis besar Organisasi NU dan hubungannya dengan Negara khususnya pada masa KH. Idham Chalid tahun 1956-1984 M. Penelitian tersebut berupa skripsi di antaranya sebagai berikut :

a. Rasyid Hidayatullah, *Demokrasi Terpimpin Menurut KH. Idham Chalid Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*. Skripsi ini memfokuskan kajian tentang latar belakang pandangan KH. Idham Chalid tentang Demokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terpimpin dan analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Demokrasi Terpimpin menurut pandangan KH. Idham Chalid.[12]

b. Solihin Hidayat, *Nahdlatul Ulama Setelah Kembali Ke Khittah 1926.* Skripsi ini memfokuskan pada kajian tentang latar belakang berdirinya NU dan perjuangan NU dalam politik praktis. Kemudian fokus kajian penelitian ini juga mengarah pada sebab-sebab munculnya Khittah 1926 dan pengaruhnya setelah NU kembali ke Khittah 1926[13].

c. Siti Chumairoh, *NU Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila).* Skripsi ini membahas tentang kondisi pemerintahan Indonesia pada akhir Orde Lama sampai lahirnya Orde Baru hingga munculnya pemberlakuan asas tunggal pancasila oleh presiden Soeharto. Selain itu juga membahas tentang dinamika dan pengaruh NU pada masa Orde Baru. Yang terakhir, fokus kajian ini pada respon NU atas pemberlakuan asas tunggal Pancasila dan juga dasar-dasar penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila, serta respon organisasi lain terhadap asas tunggal Pancasila sebagai pembanding respon NU.[14]

d. Ahmad Mahmudi, *Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pembentukan Ideologi Negara Republik Indonesia.* Skripsi ini membahas tentang

---

[12] Rasyid Hidayatullah, *"Demokrasi Terpimpin Menurut KH. Idham Chalid Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah",* (Skripsi UIN Sunan Ampel Fakultas Adab Dan Humaniora, Surabaya, 2011).

[13] Solihin Hidayat, *"Nahdlatul Ulama Setelah Kembali Ke Khittah 1926."*(Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab Dan Humaniora, Surabaya, 1989).

[14] Siti Chumairoh, *NU Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila),* (Skripsi UIN Sunan Ampel Fakultas Adab Dan Humaniora, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran NU dari masa kemerdekaan sampai pasca konstituante dalam pembentukan ideologi Negara dari sudut pandang konsep politik.[15]

e. Rudi Salam, *Pemikiran Politik KH. Idham Chalid.* Skripsi ini membahas tentang pemikiran KH. Idham Chalid dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran politiknya.[16]

Dari beberapa kajian terdahulu yang disebutkan diatas, dapat saya paparkan bahwa yang membedakan dari fokus kajian penelitian ini adalah terletak pada perilaku politik yang terapkan NU serta karakter KH. Idham Chalid dalam berpolotik yaitu dalam periode ketika ia menjabat sebagai ketua partai NU sekaligus Ketua Umum PBNU selama 28 tahun yang mencakup masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno hingga pemberlakuan asas tunggal Pancasila masa Presiden Soeharto.

G. Metode Penelitian

1. Heuristik

Heuristik atau pengumpulan data adalah proses yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber penelitian sejarah.[17] Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber tulisan, yang terdiri dari data yang diambil dan diperoleh melalui studi penelusuran pustaka berupa buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Buku atau sumber-sumber tersebut diklasifikasikan

[15] Ahmad Mahmudi, *Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pembentukan Ideologi Negara Republik Indonesia.* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Yogyakarta, 2014).
[16] Rudi Salam, "*Pemikiran Politik KH. Idham Chalid".* (Skripsi IAIN Antasari Fakultas Syari'ah, Banjarmasin, 2013).
[17] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer yang dimaksud yaitu sumber asli yang dapat memiliki bukti kontemporer atau sezaman dengan peristiwa yang terjadi.[18] Sumber primer yang didapatkan oleh penulis yaitu karya tulis asli karangan KH. Idham Chalid di antaranya sebagai berikut :

a. *Haluan Politik Negara*. Termuat dalam Majalah Api Islam No. 6. Karya Dr. KH. Idham Chalid.
b. *Parlemen, Organisasinja dan Tjaranja Bekerdja*. Karya Dr. KH. Idham Chalid.

Sementara sumber sekunder yaitu karya tulis hasil rekonstruksi sejarah oleh penulis berikutnya yang dikutip dari sumber-sumber yang sezaman pada masanya.[19] Karya-karya tersebut di antaranya sebagai berikut :

a. *Napak Tilas Perjuangan Idham Chalid : Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah.* 2008. Editor Arief Mudatsir Mandan.
b. *Idham Chalid, Guru Politik Orang NU*. 2007. Karangan Ahmad Muhajir.
c. *NU Vis-ā-vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk dan Makna.* 1999. Karangan Andree Feillard.
d. *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967.* 2003. Karangan Greg Fealy.

[18] Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2016), 68.
[19] *Ibid*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama.* 1985. Karangan Drs. Choirul Anam.

f. *NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.* 1999. Karangan Martin Van Brinessen.

g. *Nahdlatul Ulama Dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik.* 2011. Karangan M. Ali Haidar.

h. *The Radical Traditionalism Of The Nahdlatul Ulama In Indonesia*. 1981. Karangan Mitsuo Nakamura.

2. Kritik

Kritik dilakukan terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Kritik ini menyangkut verifikasi yaitu pengujian mengenai keaslian terhadap sumber tersebut dengan cara melakukan kritik ekstern dan intern.[20]

a. Kritik ekstern adalah proses untuk melihat apakah sumber yang didapat autentik (asli) atau tidak. Dalam kritik ekstern, penulis meyakini bahwa sumber tersebut adalah asli. Karena sumber yang didapat adalah karya asli dari Dr. KH. Idham Chalid yang menjadi rujukan utama dari karya-karya setelahnya. Selain itu sumber lain yang di dapatkan merupakan karya yang di terbitkan pada masanya maupun setelahnya, yang banyak merujuk pada karya asli beliau.

b. Kritik Intern adalah menjelaskan kebenaran isi dan kritik itu dapat dilakukan setelah melakukan kritik ekstern. Dalam kritik intern,

[20] Lilik Zulaicha, *Metodologi Sejarah I* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis meyakini bahwa isi dari sumber primer yang telah didapatkan adalah asli karena merupakan karya Dr. KH. Idham Chalid dan di terbitkan pada masa itu. Artikel yang berjudul *Haluan Politik Negara,*merupakan karya asli KH. Idham Chalid yang dituangkan dalam bentuk artikel yang cukup penting karena berkaitan dengan aktivitas dan pemikirannya pada masa Demokrasi Terpimpin. Selain itu juga diterbitkan dalam Majalah Api Islam yang diterbitkan oleh Yayasan Api Islam yang didirikan KH. Idham Chalid sendiri bersama KH. Saifudin Zuhri tahun 1964. Sumber kedua dari karya asli KH. Idham Chalid adalah buku yang berjudul *Parlemen, Organisasi dan Tjaranya Bekerdja* yang ditulis sendiri ketika ia menjadi anggota DPRS-RI mewakili Kalimantan tahun 1950. Buku ini berisi sebuah pengantar dalam memahami parlemen dan fungsinya dalam bernegara. Lebih dari itu, dalam buku tersebut, Idham Chalid juga membicarakan hal-hal teknis tentang tinjauan historis dan pengalaman Negara-negara lain dalam menjalankan Demokrasi. Sedangkan dalam sumber sekunder, penulis meyakini bahwa karya yang banyak ditulis oleh sejarawan modern adalah hasil dari rekonstruksi sejarah, sehingga tidak menutup kemungkinan mengandung unsur subjektifitas di dalamnya.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran adalah suatu upaya untuk mengkaji kembali sumber-sumber yang didapatkan dan yang telah diuji keasliannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah saling berhubungan yang satu dengan lainnya.[21] Dalam kaitannya dengan Dinamika Politik Hubungan NU dan Negara pada masa Dr. KH. Idham Chalid tahun 1956-1984 M, sumber yang berhasil penulis dapat yaitu tentang perjuangan Dr. KH. Idham Chalid dalam memimpin NU dan peran NU dalam pemerintahan yang memuat tentang sejarah dan kiprah NU dalam politik kebangsaan pada masanya.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari metode untuk menyusun atau merekonstruksi sejarah secara sistematis tentang data yang didapatkan dari penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk tulisan.[22] Dalam hal ini, peneliti berusaha menulis hasil penelitian yang di tuangkan melalui karya skripsi. Di dalamnya berisi tentang "Dinamika Sejarah Politik NU : Studi Tentang Hubungan NU dan Negara Pada Masa Dr. KH. Idham Chalid Tahun 1956-1984 M".

H. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini ditulis dan disusun dalam beberapa bab dengan tujuan memudahkan penjelasan. Setiap bab membahas tentang isi yang berbeda dan saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Perincian bab tersebut sebagai berikut:

[21] *Ibid*, 17.
[22] Dudung Abdurrahman, *Metode Penulisan Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian, dan daftar pustaka.

BAB II membahas tentang riwayat hidup dan perjuangan KH. Idham Chalid mulai dari latar belakang keluarga dan pendidikannya, sebagai ulama NU dan kiprah politik dalam pemerintahan, serta penghargaan dan karya-karyanya dalam perjuangan karirnya.

BAB III membahas tentang sejarah awal politik NU dan hubungan, serta peran NU terhadap Negara pada masa Dr. KH. Idham Chalid.

BAB IV berisi analisa kritis mengenai perilaku politik NU dan Dr. KH. Idham Chalid dalam perpolitikan Negara Indonesia.

BAB V Penutup, menguraikan tentang beberapa kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan, analisa terhadap permasalahan yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

RIWAYAT HIDUP DAN PERJUANGAN DR. KH. IDHAM CHALID

A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

Idham Chalid dilahirkan di desa Setui, dekat wilayah kota Baru, bagian tenggara Kalimantan Selatan, pada Senin pagi 5 Muharram 1341 H bersamaan dengan 27 Agustus 1922 M.[1] Keterangan lain menyebutkan, ia lahir 5 Januari 1922 M. Menurut kalender abadi Iwan Gayo (1997) disebutkan bahwa tanggal 27 Agustus 1922 adalah hari Minggu, sedangkan tanggal 5 Januari 1922 adalah hari Senin.[2] Saat itu, Setui menjadi ibukota onderdistrik, masuk wilayah distrik Tanah Laut, Paleihari, Kalimantan Selatan. Pada tahun 1925, Setui masuk wilayah Tanah Bambu Pegatan, dan statusnya diturunkan menjadi desa (kelurahan). Pada waktu itu kepala onderdistrik adalah seorang asisten kiai, dan ayahnya, Muhammad Chalid diangkat menjadi penghulu. Muhammad Chalid juga mempunyai keahlian sebagai pawang buaya, yang waktu itu di Setui ada Sungai yang disukai dan dihuni oleh sekian banyak buaya yang buas dan ganas.[3]

Idham hidup rukun dengan delapan bersaudara. Muhammad Chalid (sang ayah) masih berdarah Melayu Banjar asli. Sang ayah menikah dua kali.

---

[1] *Autobiografi Dr. KH. Idham Chalid, untuk anak-anakku, cucu-cucuku dan murid-muridku.* dalam buku Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid : Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah* (Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2008), 23.
[2] *Ensiklopedia Islam* (1994) dan *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986* (1986), tertulis 5 Januari 1922. *Ibid*, 90.
[3] *Ibid*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan istri pertama bernama Umi Antung melahirkan tiga orang anak (dua perempuan, satu laki-laki), yaitu Maswah, Siti Gumrah, dan Abdul Hakim. Pernikahan kedua dengan Hj. Umi Hani, asli Setui berdarah Banjar-Melayu, juga berdarah Bugis, melahirkan lima orang anak (tiga laki-laki dan dua perempuan), yaitu Thaher, Hasbullah, Nikmah, Nurjamah, dan Idham merupakan anak sulung. Menurut keterangan salah seorang kerabat Idham Chalid yaitu H. Ridwan Bakri, mereka delapan bersaudara hidup rukun dan sangat dekat dengan dua istri ayah mereka.[4]

Sejak kecil sampai berumur 8 tahun, Idham belajar baca tulis (Latin dan Arab), dan mengaji pada ayahnya. Karena pada waktu itu di Setui belum ada Sekolah Dasar, Idham bersama anggota keluarganya dan murid-murid ayahnya belajar bersama di Pondok Pesantren yang serba sederhana. Awal tahun 1930, Idham sekeluarga pindah ke Pegatan, ibukota distrik Tanah Bambu dimana Setui masuk dalam wilayah itu.[5] Pada tahun 1931, Idham masuk Sekolah Dasar (*Gouverment 2e klasse*), satu-satunya perguruan yang ada di Pegatan. Kegemaran Idham membaca lebih besar dari pada kegemaran bermain bersama anak-anak lain. Hal ini mencerminkan kepribadian Idham sebagai anak yang cerdas pada masa itu. Ia sangat senang meminjam buku di tempat persewaan buku-buku bahasa Indonesia keluaran Balai Batavia, yang

[4] *Ibid*, 90.

[5] Idham menceritakan faktor perpindahan tersebut karena pada masa itu disebut zaman *malaise*, dimana sangat susah mencari duit, perdagangan mundur, dan orang banyak menganggur. Pada saat semua penduduk sibuk merantau untuk memperbaiki ekonominya, ayahnya mempunyai alasan kuat untuk pindah ke Amuntai agar Idham dapat melanjutkan pendidikannya di Amuntai karena banyak orang-orang alim dan ahli agama Islam alumni Mekkah disana. Pada saat itu ayahnya berhenti menjadi penghulu Setui dan mengajak beberapa keluarganya (emak, idham, dan adik perempuannya) pindah ke Pegatan. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain tetap di Setui, dan ada beberapa di Banjarmasin. *Ibid*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan program pemerintah di sekolah-sekolah Gubernemen kelas II (sebutan Sekolah Dasar) pada waktu itu. Sehingga pada usia 10 tahun, ia hafal nama-nama pengarang yang dikagumi, seperti Muhammad Hasim, Suman H.S., N. St. Iskandar, Abdoel Moeis, Marah Rusli, dan lain-lain.

Akhir tahun 1932, Idham sekeluarga meninggalkan Pegatan menuju kota kelahiran ayahnya, Amuntai. Dalam perjalanan ke Amuntai, keluarganya sempat singgah beberapa bulan di Banjarmasin. Di Amuntai, Idham mendaftar di sekolah Melayu setingkat dengan *Gouverment 2^{e} klasse* (*Vervolgschool*). Di sekolah ini, Idham diterima pada permulaan tahun ajaran dikelas IV. Setamatnya dari *Vervolgschool* pada tahun 1934, ia masuk ke Madrasah Islam di Pekapuran yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdurrasyid, seorang ulama besar bersyahadah ‘Alimiyyah dari Al-Azhar University, Kairo. Ketika Idham masuk ke Madrasah tersebut, Tuan Guru Haji Abdurrasyid telah berpulang ke rahmatullah, sehingga yang memimpin perguruan waktu itu adalah Mu’allim Haji Djuhri Sulaiman yang juga merupakan alumni Al-Azhar University. Untuk mengenang dan menghormati Tuan Guru Haji Abdurrasyid, nama madrasah tersebut diganti menjadi Al-Madrasatur Rasyidiyyah. Di madrasah ini Idham hanya belajar kurang lebih empat tahun.

Akhir tahun 1938, atas restu ayah dan guru-gurunya, Idham berangkat dari Amuntai ke Pondok Modern Gontor, Ponorogo untuk melanjutkan pendidikannya. Pondok Modern Gontor terletak di desa Gontor dekat Sungai Malo, Kecamatan Mlarak, sekitar 12 km selatan kota Ponorogo. Awalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren ini dinamakan Pondok Pesantren Darussalam yang didirikan pada tanggal 9 Oktober 1926 bertepatan dengan 12 Rabiul Awwal 1346 H. Di sana ia ditempatkan di kelas I *Kweek School (onderbouw)* yang lebih populer dengan Kulliyyatul Mu'allimin al-Islamiyyah setingkat SLTP kurang lebih dua tahun. Kemudian ia naik ke tingkat *Kweek School Islam (Bovenbouw)* atau KMI setingkat SLTA. Pada tahun 1940, ia sempat mengajar di Madrasah Pondok Modern Gontor Ponorogo Bagian Tinggi (*Bovenbouw Kweek School Islam*).[6]

Kemampuan Idham dalam bahasa asing tidak hanya bahasa Arab dan Inggris. Tetapi ia juga mampu menguasai bahasa Jepang. Sehingga pada tahun 1943[7], atas kesungguhannya yang ingin belajar bahasa Jepang, salah satu gurunya di Pondok Modern Gontor, Ustadz Imam Zarkasyi memberinya kesempatan untuk ikut ke Jakarta menghadiri undangan *Syumubu* (Kantor Agama Gunseikanbu). Atas rekomendasi dari *Syumubu*, Idham diterima belajar di *Djakarta Nippongo Gakko* bagian *Honka* di Jl. Cilacap Jakarta. Perkembangannya dalam menguasai bahasa Jepang sangat cepat. Bahkan ia sempat menjadi pengajar bahasa ini. Pihak Jepang sangat senang karena ada anak muda pribumi yang menguasai bahasa mereka. Menurut Keterangan H. Napiah, 24 November 2004 di Amuntai, bahkan Idham sempat diundang untuk berkunjung ke Negara Jepang pada waktu itu.[8]

---

[6] *Ibid*, 433.
[7] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 25.
[8] *Ibid*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Berkenalan dengan Kiai NU, Mengajar di Gontor, dan Kembali ke Kampung Halaman

Di Jakarta pertama kali, ia ditempatkan di asrama para kiai yang datang dari daerah-daerah Jawa-Madura untuk latihan alim ulama. Di tempat itulah ia mulai mengenal para kiai pemimpin utama Jam'iyyah NU di daerah-daerah yang sudah aktif sebelum zaman pendudukan Jepang. Diantaranya seperti Kiai Syamsul Arifin dari Bondowoso, Kiai Bajuri dari Panarukan, Kiai Abdul Hannan dari Jember, dan banyak lagi kiai-kiai dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.[9] Pergaulannya dengan kiai-kiai tersebut yang dibilang sangat singkat kurang lebih dua bulan, ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap dirinya.

Setelah enam bulan berlalu di Jakarta, ia menamatkan pendidikan bahasa Jepang pagi di *Chutoka* dan sore di *Kotaka* dengan nilai terbaik di kedua tingkat tersebut. Setelah lulus, ia masih bertahan di Jakarta untuk menambah pengetahuan. Di sana ia sempat bergaul dengan orang Taman Siswanya Pak Said, dengan orang *Jam'iyyatul Khaer*, sempat juga mengajar private bahasa Indonesia bagi orang *Nippon* dan kursus mengetik pada *Kurida*. Bahkan ia juga sempat dipercaya oleh orang-orang Jepang sebagai penerjemah ketika mereka sedang melakukan perkumpulan dengan para alim ulama. Kemudian ia ditawari oleh T. Abdul Hamid Ono (onishi) untuk bekerja di *syumubu*-nya KH. Hasyim Asy'ari. Tetapi ia menolaknya dengan hormat karena ia masih berkewajiban kembali ke Pondok Modern Gontor

[9] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membantu gurunya, KH. Imam Zarkasyi yang telah membuatnya bisa sekolah di Jakarta.

Pada tahun 1944, pimpinan pengajaran selama KH. Imam Zarkasyi bertugas di Jakarta berada di tangan Ustadz ‘Ali Murtadlo, seniornya ketika di *Bovenbouw*. Idham membantunya dalam memimpin pengajaran ilmu agama, ilmu bahasa Arab, ilmu pengetahuan umum, dan ilmu bahasa Jepang yang telah ia peroleh selama di Jakarta. Tidak lama setelah itu, ia ditugasi sebagai Ketua Majelis Pengajaran.

Selama di Gontor, kesadaran berorganisasi Idham semakin meningkat. Ia mulai berkenalan dengan beberapa tokoh di daerah Ponorogo, antara lain Kiai Syamsuddin Duri Sawo, Kang Kusno (tokoh-tokoh NU di Ponorogo), Abu Wastono (nasionalis), Ridwan Kajir (tokoh Muhammadiyah Jetis Ponorogo), dan anggota *Syu Sangikai* (semacam DPRD Karesidenan Madiun). Ia juga sangat mengagumi tokoh muda yang simpatik, energik, dan dinamis, Isnaeni namanya, yang beberapa kali memberikan ceramah pada organisasinya di Gontor, *Raudatul Muta’allimin.*

Setelah kurang lebih lima tahun ia menjadi guru di Pondok Modern Gontor. Pada tahun 1945, atas permintaan orang tuanya, Idham kembali ke Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1944, Madrasatur Rasyidiyyah mengalami kekosongan pimpinan dalam rentang waktu hampir satu tahun. Terkait semakin ketatnya pengawasan dari pihak Jepang, Idham diminta untuk menjadi kepala sekolah di Madrasatur Rasyidiyyah. Setelah mengiyakan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jabatan tersebut, dan atas musyawarah mufakat, nama perguruan diubah menjadi Normal Islam Ma'had Rasyidiyyah.[10] Dalam perkumpulan musyawarah antar madrasah-madrasah di Pekapuran yang dihadiri oleh alim ulama, memutuskan untuk mendirikan satu organisasi yang mengkoordinir madrasah-madrasah atau ma'had-ma'had Islam agar sistem pengajaran dan mata pelajarannya seirama dalam organisasinya. Untuk mempertimbangkan keinginan tersebut, maka lahirlah organisasi resmi Ittihadul Ma'ahidil Islamiyyah (IMI) yang juga bisa disebut Ikatan Madrasah-madrasah Islam. Jaringan pesantren ini lahir pada saat pendudukan Jepang.

Pimpinan IMI terdiri dari Majelis Syura dan Majelis Luhur. Majelis Syura diketuai oleh Guru H. Djuhri Sulaiman, dan Majelis Luhur diketuai oleh Idham Chalid. Perkembangan IMI sangat pesat, sehingga mampu mendirikan Madrasah-madrasah Ibtidaiyah di tempat-tempat yang dirasa perlu atas permintaan rakyat yang haus akan pendidikan. Perguruan Islam banyak yang bergabung dalam IMI, diantaranya *Normal Islam* (Pekapuran, Amuntai), *Al-Fatah* (Paliwara Hilir), *Zakhratun Nisaa* (Paliwara Hulu), *Al-Hidayah* (Sungai Durian), dan lain-lain. Mereka menyadari bahwa hanya dengan bekerja sama, maka umat islam dapat maju dan terus menyebarkan agama islam dan pengetahuan umum. Idham Chalid pun diangkat menjadi Ketua Umumnya, dan Normal Islam menjadi pusat segala kegiatan.[11]

[10] *Ibid*, 27.
[11] *Ibid*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sepak Terjang Berorganisasi

Sejak kecil sampai berusia 15 tahun, Idham sudah banyak pengalaman mengikuti kegiatan organisasi seperti Mauludan, kasidahan, dan seni lagu Arab. Di Amuntai, berdiri organisasi-organisasi semacam klub-klub yang mendidik anak-anak muda agar lancar membaca kitab *Maulud Diba'i*, melagukan syair-syair, melagukan kasidah dan syair-syair Arab, lagu-lagu Mesir dan juga membaca ayat Alquran dengan *nagham*. Di antara organisasi itu adalah PUADI (Persatuan Untuk Anak-anak Diba'i Islam) yang bertempat di Paliwara Hilir, dipimpin oleh Guru Asnawi dan Guru Abdul Muthalib.[12]

Pada tahun 1937, ayahnya mengirim Idham ke Negara[13] untuk mengaji kira-kira delapan bulan. Disitulah Idham mulai mengenal organisasi NU untuk yang pertama kalinya. Ia mulai mengenal Sayed Abu Bakar al-Idrus, salah seorang pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) di Kalimantan Selatan. Ia tertarik untuk menjadi anggota *Ansor Nahdlatul Ulama*. Tokoh besar Ansor di Negara pada waktu itu adalah KH. Tohir Bakri.[14]

Pada tahun 1940, Idham menjadi Guru Madrasah Pondok Modern Gontor Bagian Tinggi (*Bovenbouw Kweek School Islam*). Tahun 1944, ia menjadi Direktur Normal Islam di Amuntai Kalimantan Selatan. Tahun 1945, Idham menjadi anggota Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) yang bertempat di Banjarmasin. PRI adalah partai politik yang didirikan di Kalimantan atas

---

[12] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 68.
[13] Negara adalah nama sebuah kota di Kalimantan Selatan yang pada masa itu terkenal sebagai kota alim ulama dan kota Industri rakyat.
[14] *Ibid*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anjuran pemerintah Jepang saat mereka kalah dari sekutu. Berdiri resmi pada 16 Agustus 1945 dengan ketua umum Pangeran Muda Ardi Kesuma. Pada saat yang bersamaan, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah (HSU) di kota Amuntai tahun 1945.[15] Setahun kemudian, yaitu 1946, untuk memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kalimantan, dibentuklah Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dan Serikat Muslimin Indonesia (Sermi), semacam Masyumi di Jawa dan Sumatera. Saat itu di daerah tersebut, Belanda melarang untuk mendirikan Masyumi. Maka organisasi tersebut tetap didirikan tetapi dengan nama Sermi yang serupa dengan Masyumi. Kedua partai tersebut dibentuk bertujuan untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 bagi berdirinya Negara Kesatuan RI. Pada saat itu, Idham aktif mendirikan cabang-cabang, anak-anak cabang Sermi di daerah Hulu Sungai Utara. Mengingat tujuannya untuk perjuangan bangsa dan Islam, banyak dari pemimpinnya merupakan alim ulama dan pemuka-pemuka Islam serta alumni perguruan Islam yang sebagian besar menyalurkan aspirasi politiknya melalui Sermi.[16]

Pada tahun 1947, Idham bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK), sebuah organisasi bawah tanah yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Pemimpinnya adalah

[15] Idham Chalid, *Mendajung dalam Taufan*, 133, lihat Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 33.
[16] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Brigjen Hassan Basry.[17] Kemudian organisasi ini berubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) DIVISI IV yang berdri di Mojokerto (Jawa Timur).[18] Di sini, Idham menjadi Penasehat Staf Umum dan Kepala Bidang Sipil. Keterlibatannya di SOPIK membuatnya ditangkap dan ditahan tentara NICA pada tanggal 27 Maret 1949 dengan tuduhan menjadi penasihat, pelatih, dan mendalangi gerilya. Tuduhan tersebut didasarkan atas fakta bahwa pimpinan gerilya adalah Hassan Basry yang pernah menjadi muridnya. Fakta lain, ditemukannya selembar foto oleh tentara NICA ketika menggerebek sebuah studio foto Banjarmasin. Foto tersebut memuat Idham Chalid bersama J. Hamdi dan Chairul Lima dengan seragam masing-masing sebagai pelatih, ketua, dan penulis Kwartir Cabang Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI) di Amuntai.[19]

Pada tahun 1948, Idham bersama Hassan Basry dan anggota ALRI DIVISI IV mendirikan Fonds Nasional Indonesia Kalimantan di Banjarmasin.[20] Pada akhir tahun 1947, terdengar keputusan Belanda akan mendirikan Dewan Daerah yang membicarakan persoalan daerah saja.[21] Pada tahun 1949, Idham dicalonkan oleh Badan Koordinasi Partai-partai Republiken (SKI, Sermi, Gappika) sebagai Anggota Dewan Daerah Banjar dari fraksi Republiken untuk pemilihan Amuntai Utara. Pada tahun yang

---

[17] Hassan Basry adalah Bapak Gerilya Kalimantan Selatan. Lahir 17 Juni 1923. Ia sebelumnya adalah pemimpin Lasykar Saifullah bentukan Sermi yang bertugas menyambut kiriman senjata dari Pulau Jawa. Ia dan Idham Chalid pernah nyantri bersama di Pondok Modern Gontor. Lihat Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 35.
[18] Dikutip dari Anonim, *Mengenang Hassan Basry*, 8-10. *Ibid*, 36.
[19] *Ibid*, 36.
[20] Idham Chalid, *Mendajung Dalam Taufan*, 133. *Ibid*, 36.
[21] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama ia merangkap sebagai Perwira Penerangan Daerah Sub. Terri, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Divisi Lambung Mangkurat. Pemilihan ini merupakan siasat Belanda untuk mendirikan Negara Kalimantan. Namun, Negara Kalimantan gagal didirikan karena calon-calon yang didukungnya kalah dalam pemilihan Dewan Daerah Banjar tersebut.[22] Atas kekalahan tersebut, Belanda sangat terpukul, sehingga para anggota Dewan Republiken yang duduk dalam pemerintahan ditangkapi, termasuk Idham. Dalam catatannya, ia dipenjara lagi selama 40 hari.[23] Kemudian Idham keluar dari tahanan pada akhir Oktober dan awal Novemper 1949. Proses pengeluaran tahanan berjalan selama 10 hari.[24] Setelah keluar dari tahanan, Idham aktif dalam perjuangan untuk menggabungkan wilayahnya menjadi daerah Republik dan membubarkan Dewan Daerah Banjar yang sudah tidak relevan lagi.

Pada bulan Desember 1949, datang undangan kepada Sermi untuk menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta. Idham beserta rombongan menjadi delegasi Sermi Kalimantan untuk menghadiri kongres tersebut. Kongres Umat Islam berlangsung selama 5 hari. Idham Chalid terpilih menjadi anggota DPR RIS mewakili Pengurus Besar Sermi, ketua umum Sermi terpilih Dr. Diapari dan Ketua I Sermi adalah Hasan Basri[25].

---

[22] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 37.
[23] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 172.
[24] *Ibid*, 212.
[25] Hasan Basri yang disebut ini bukanlah Hasan Basry Bapak Gerilya Kalimantan yang pernah berjuang bersama Idham di ALRI DIVISI IV. Hasan Basri yang ini adalah tokoh Masyumi asal Kalimantan Selatan yang juga seangkatan dengan Idham Chalid. Pernah menjadi anggota DPRS mewakili Kal-Sel, salah satu Ketua Partai Masyumi, dan turut serta terlibat dalam usaha rehabilitasi partai ini pada awal Orde Baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian mereka bertiga berangkat ke Jakarta.[26] Akhirnya perjuangan mereka di Jakarta membawakan hasil, daerah Kalimantan diterima parlemen dan resmi menjadi daerah Republik Indonesia. Kemudian Sermi mengadakan kongres istimewa yang menghasilkan keputusan bahwa Sermi menggabungkan diri ke dalam Masyumi Kalimantan. Akhirnya organisasi ini resmi mengubah namanya menjadi Partai Islam Masyumi Kalimantan.

Ketua wilayah waktu itu adalah Hasan Basri. Idham menyadari meskipun Hasan Basri adalah orang Masyumi, tetapi ia juga selalu berhubungan baik dengan orang-orang NU. Menurutnya, organisasi NU adalah anggota istimewa Masyumi, sehingga semua orang NU yang ada di DPR adalah anggota fraksi Masyumi.[27] Kemudian pada tahun 1950, ia menjadi anggota Parlemen Sementara (DPR RIS) Wakil Daerah Banjar, Kalimantan.[28] Pada tahun yang sama, ia juga menjabat sebagai Anggota Parlemen Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga tahun 1955. Pada tahun 1955, ia menjadi Anggota DPR wakil daerah Jawa Barat, dan pada tahun 1956 menjadi Anggota Konstituante.[29]

D. Meretas Jalur Politik Lewat NU

Idham memulai kariernya di Jakarta dengan aktif di Gerakan Pemuda Anshor pada tahun 1950. Kemudian sebagai ketua PB Ma'arif, suatu organisasi yang berafiliasi kepada NU dengan konsentrasi pada penanganan

[26] *Ibid*, 219.
[27] *Ibid*, 222.
[28] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 37.
[29] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah pendidikan di tahun 1952.[30] Idham menjadi anggota Majelis Pertimbangan Politik PBNU yang garis besarnya bertugas mengikuti perkembangan politik di tanah air, membuat analisa, dan menyimpulkannya untuk diserahkan kepada PBNU sebagai suatu saran atau usul. Majelis ini dibentuk pada 2-3 September 1951.[31]

Pada tahun 1943, Idham sudah mengenal tokoh-tokoh NU, salah satunya adalah KH. A. Wahid Hasyim. Ketertarikan Idham terhadap sosok KH. A. Wahid Hasyim mengantarnya belajar banyak dari beliau. Pada tahun 1950, ia diutus oleh KH. A. Wahid Hasyim yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama untuk mengunjungi beberapa Negara, seperti Singapura, Bangkok (Thailand), India, Pakistan, Kairo, Mesir, dan terakhir ke Jeddah Arab Saudi. Tujuan utama ke Negara-negara tersebut adalah untuk mengawasi persoalan haji bersama Panitia Haji Indonesia (PHI). Kemudian KH. A. Wahid Hasyim mengangkat Idham menjadi Koordinator Majelis Pimpinan Haji (MPH).[32] Pada tahun yang sama, Idham juga sering menemani KH. Wahab Chasbullah, Rais Am PBNU, mengikuti safari rutin ke cabang-cabang NU.[33]

Pada Muktamar NU ke-19 tanggal 28 April sampai 1 Mei 1952 di Palembang, Idham hadir dan ikut sebagai seorang anggota Pengurus Besar sekaligus merangkap menjadi utusan dari NU Wilayah Kalimantan Selatan,

---

[30]*Ibid*, 39.
[31] *Ibid*, 38.
[32] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 227-234.
[33] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ia masih menjadi Wakil Rais Syuriah dan Ketua Wilayah Anshor Kalimantan Selatan pada waktu itu. Sedangkan di PBNU, ia menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Politik (MPP) dan di Masyumi menjadi anggota Fraksi Masyumi di DPR bersama A.A. Achsien menjadi anggota Dewan Partai mewakili NU. Dalam struktur organisasi Partai Masyumi ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ada Dewan Partai. orang NU yang duduk di DPP adalah KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, dan H. Zainul Arifin. Idham aktif di NU maupun Masyumi. Karena waktu itu di PBNU ia menjadi sekretaris Majelis Pertimbangan Politik (MPP), setiap perkembangan politik di Masyumi disampaikan ke PBNU untuk dijadikan pendapat NU dalam setiap masalah yang dibicarakan dalam Dewan Partai Masyumi.[34] Dalam Muktamar tersebut, Idham diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PBNU, dan ketua umum PBNU adalah KH. Masykur.[35]

Ketika Idham masuk ke Fraksi NU di DPR yang diketuai oleh H. Zainal Arifin, ia tidak keluar dan tetap menjadi bagian dari Masyumi. Setelah NU secara resmi menyatakan keluar dari Masyumi pada tahun 1952, NU mendirikan partai sendiri dan ikut dalam pemilu 1955. Pada pemilu tersebut, Idham memegang jabatan penting sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum NU (Lapunu), yaitu Dewan khusus yang menangani pemilu bagi partai NU yang dibentuk bulan Mei 1953 yang bertanggung jawab menangani segala permasalahan yang berhubungan dengan pemilu.[36] Partai NU menempati

[34] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 241.
[35] *Ibid*, 242.
[36] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringkat ketiga dibawah PNI dan Masyumi. Kemudian, Idham terpilih menjadi anggota DPR dari Fraksi partai NU. Ketika anggota DPR diresmikan, Presiden menunjuk Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai formatur. Idham terpilih menjadi Wakil Perdana Menteri II mewakili NU dan masuk dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo II.[37] Kabinet ini kemudian dikenal sebagai Kabinet A-R-I (Ali-Roem-Idham). Pada saat yang bersamaan, Idham merangkap menjadi Kepala Biro Keamanan. Karena ketentuan undang-undang pada waktu itu seorang menteri tidak bisa merangkap menjadi anggota parlemen, maka Idham mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Prestasi tersebut dinilai luar biasa dengan usia Idham yang baru 34 tahun, tanpa pengalaman sebagai Menteri.

Pada Muktamar ke-21 yang diselenggarakan di Medan Sumatera Utara tahun 1956, Idham terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Pada tahun 1956-1957. Awal kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU, Idham menghadapi pergolakan politik yang cukup rumit. Ditambah lagi manuver-manuver politik Soekarno yang ingin mendirikan Demokrasi Terpimpin, akhirnya Kabinet hasil Pemilu, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya pada Presiden 14 Maret 1957. Pada tanggal 31 Dsember 1956, Idham merangkap sebagai Menteri Veteran setelah Menteri Veteran Dahlan Ibrahim mengundurkan diri. Pada tanggal 16 Maret 1957, ia merangkap sebagai Menteri Penerangan setelah Menteri Penerangan Sudibjo mengundurkan

[37] *Ibid*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri.[38] Dalam pmbentukan kabinet selanjutnya, Idham terpilih kembali sebagai wakil NU pada Kabinet pimpinan Djuanda atau Kabinet Karya sebagai Wakil Perdana Menteri II pada tanggal 9 April 1957 sampai 22 Juli 1959.[39]

Sebulan setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada bulan Juli 1959, pada bulan Agustus Idham diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sampai tahun 1960. Badan ini berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Pemerintah, dan pada masa itu lebih banyak berpengaruh dari pada Parlemen. Pengangkatan Idham ini adalah karena kedekatannya dengan Soekarno. Idham bahkan menjadi pembela blak-blakan dari manifesto ideologis nasionalistik populis Soekarno.[40] Selanjutnya, pada tahun 1960, Idham menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Tugasnya antara lain membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang didasarkan pada pidato-pidato Presiden Soekarno.[41] Pada tanggal 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963, Idham menjadi Wakil Ketua MPRS dengan kedudukan sebagai Menteri Kabinet Kerja III. Pada tahun yang sama, 1962, ia juga menjadi Ketua Lembaga MISSI Islam.[42] Pada tanggal 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964, ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS dengan

[38] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 434.
[39] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 43 dan Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 434.
[40] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 44.
[41] Pidato tersebut antara lain, pidato pada tanggal 17 Agustus 1959 tentang Manifesto Politik, pidato di depan Dewan Perancang Nasional pada 28 Agustus 1959, pidato 17 Agustus 1960, dan pidato di depan Sidang Umum PBB pada 30 September 1960. Setelah MPRS membahas keempat pidato tersebut, kemudian memperkuatnya dan meresmikan menjadi GBHN.
[42] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Koordinator Kabinet Kerja IV. Pada tahun yang sama, 1963, Idham merangkap sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Partai Islam Tingkat Pusat.

Pada tanggal 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966, Idham menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS dengan kedudukan sebagai Menteri Koordinator Kabinet Dwikora. Kemudian pada tanggal 24 Februari 1966, posisi Wakil Perdana Menteri kembali dijabat Idham dalam jajaran Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Pada tahun ini, ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS, menjadi Menteri Utama Bidang Politik, dan merangkap sebagai Menteri Tenaga Kerja.[43] Pada tanggal 28 Maret – 25 Juli 1966, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II Bidang Hubungan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Pada tanggal 25 Juli 1966 sampai 17 Oktober 1967, Idham menjadi Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabinet Ampera, merangkap sebagai Ketua Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Nasional, sekaligus Koordinator Masalah Keluarga Berencana Nasional.[44]

Pada pemerintahan Orde Baru, Idham diangkat menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat dalam kurun waktu 1967-1970. Pada tanggal 17 Oktober 1967 sampai 6 Juni 1968, Idham menjadi Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dalam Kabinet Ampera yang disempurnakan. Pada tanggal 6 Juni 1968 sampai 27 Maret 1973 sebagai Menteri Negara

[43] *Ibid*, 434.
[44] *Ibid*, 434-435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang Kesra Kabinet Pembangunan I, sekaligus Menteri Sosial Kabinet Pembangunan I. Pada pemilu pertama masa Orde Baru tahun 1971, yang merupakan pemilu kedua sekaligus terakhir bagi Partai NU setelah pemilu 1955 pada masa Orde Lama, presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan baru untuk penyederhanaan partai atau fusi, yaitu penggabungan beberapa partai yang memiliki kesamaan ideologis, NU akhirnya bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1973, dan Idham Chalid menjadi Ketua sekaligus Presiden PPP . Setelah pemilu selesai, Idham terpilih menjadi Ketua MPR dan DPR RI masa bhakti 1971-1977. [45] Kemudian Idham terpilih lagi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tahun 1978-1983. Pada tahun 1984, Idham Chalid menjadi Anggota Team Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team/Badan P-7). Pada tahun 1985, menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).[46]

Di Nahdlatul Ulama, setelah jabatan Ketua Umum PBNU berakhir pada tahun 1984, Idham Chalid menjabat sebagai Mustasyar PBNU. Kemudian pada tahun 1985, jabatan terakhirnya di NU adalah menjadi Mudir ‘Am Jam’iyyah Ahlith Thariqoh al-Mu’tabaroh an-Nahdliyyah.[47] Ditengah perjuangannya dalam arus politik tahun 1950-an, Idham Chalid mulai merintis berdirinya Lembaga Pendidikan atau Perguruan Darul Ma’arif pada tahun 1954 di daerah Cipete, Jakarta Selatan. pada tahun 1955, lembaga ini

[45] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 9.
[46] *Ibid*, 435.
[47] *Ibid*, 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah berdiri dan secara fisik bangunan gedungnya mulai terwujud dalam bentuk sederhana. Lembaga tersebut diperuntukkan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah khususnya wilayah Jakarta Selatan, dan baru resmi berbadan hukum pada tanggal 15 Desember 1959 sebagai Yayasan Darul Ma'arif di Notaris Adlan.[48] Kemudian pada tahun 1960, KH Idham Chalid mendirikan Lembaga Pendidikan Darul Qur'an yang disertai pendirian Rumah Yatim di Cisarua Bogor, Jawa Barat.[49]

Yayasan ini mengembangkan Perguruan Darul Ma'arif sesuai jenjang pendidikan yang berkembang mulai dari Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1958. Kemudian pada tahun 1962, membuka jenjang pendidikan tingkat Madrasah Aliyah. Tahun 1964, membuka jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar Islam. Tahun 1974, membuka jenjang Taman Kanak-kanak (TK Islam). Tahun 1977, membuka jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Pada tahun 1979, membuka jenjang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), dan tahun 1985 membuka Perguruan Tinggi yang bernama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).[50]

Menurut KH. Zainal Arifin Zamzam, ada dua alasan yang melatarbelakangi KH. Idham Chalid mendirikan lembaga pendidikan tersebut. Alasan pertama, pada tahun 1954, banyak ulama Jakarta berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang merupakan

---

[48] *Ibid*, 388. Di kutip dari wawancara dengan KH. Zainal Arifin Zamzam, anggota Dewan Pengurus Harian Yayasan Darul Ma'arif di Cipete, Jakarta Selatan, Selasa 26 Desember 2006.
[49] *Ibid*, 389.
[50] *Ibid*, 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan penggalakan syiar Islam di kediaman KH. Idham Chalid, Jl. Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Para ulama banyak memberi dorongan agar KH. Idham Chalid mendirikan lembaga pendidikan bagi umat Islam di Jakarta dan sekitarnya. Alasan kedua, adanya dorongan dan wasiat dari ayahnya agar kelak Idham dapat mendirikan lembaga pendidikan Islam.[51]

Sekitar tahun 1998, KH. Idham Chalid terserang stroke. Kondisi kesehatannya cenderung menurun ditambah faktor usianya, Idham Chalid terpaksa menjalani operasi pemasangan selang ke lambung untuk keperluan memasukkan obat-obatan, makanan, minuman, dan nutrisi lainnya. Peristiwa ini terjadi sekitar bulan Januari-Februari tahun 1999 dan terus berlangsung hingga tahun 2007 karena setiap enam atau tujuh bulan sekali selamh harus diganti yang baru.[52] Pada Ahad, 11 Juli 2010 pagi hari pukul 08.00 WIB, KH. Idham Chalid meninggal dunia pada usia 88 tahun karena sakit yang dideritanya kurang lebih 10 tahun terakhir di kediamannya kawasan pendidikan Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan. Jenazahnya dimakamkan pada Senin, 12 Juli 2010 di Pondok Pesantren Darul Qur'an, Cisarua Bogor, Jawa Barat.[53] Beliau meninggalkan isteri, anak dan sejumlah cucunya.[54]

---

[51] *Ibid*, 387-388.
[52] *Ibid*, 391.
[53] Tempo.co, "Idham Chalid Meninggal Dunia", dalam https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/262404/ (nasional.tempo.co, 11 Juli 2010).
[54] Mukafi, "Mantan Ketua Umum PBNU KH. Idham Chalid Wafat", dalam http://www.nu.or.id/post/read/23722/ (NU Online, 11 Juli 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Karya-karya dan Penghargaan

Idham bukanlah seorang penulis produktif pada zamannya. Hal ini menjadikan para peneliti sejarah yang ingin menulis tentang dirinya mengalami kesulitan dalam mencari sumber asli karya beliau. Meskipun Idham bukanlah seorang penulis produktif, bukan berarti tidak ada karya yang dihasilkannya. Selain itu, kemampuannya dalam publik speaking juga sangat baik.

Idham aktif menulis di *Duta Masyarakat*, sebuah koran yang berafiliasi dengan NU. Satu artikel yang cukup penting berkaitan dengan aktivitas dan pemikirannya di masa Demokrasi Terpimpin berjudul *Haluan Politik* yang diterbitkan tahun 1965 oleh Majalah Api Islam. Majalah Api Islam merupakan majalah yang diterbitkan oleh Yayasan Api Islam yang didirikan oleh Idham bersama Saifuddin Zuhri pada tahun 1964, yang bertugas untuk mempropagandakan gagasan-gagasan Soekarno di kalangan Muslim Tradisional.[55]

Sewaktu masih aktif di pergerakan kemerdekaan di Kalimantan, Idham menghasilkan sebuah tulisan tangannya sendiri yang diterbitkan sewaktu ia dipenjara pada tahun 1949. Judulnya *Bertamasya ke Cakrawala*, dan diterbitkan atas kerja sama dengan Haspan Hadna, pemimpin redaksi "Indonesia Berjuang".[56] Dalam catatannya ia menjelaskan bahwa, ia membuat karangan yang diberi judul *Bertamasya ke Cakrawala* untuk

[55] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 44.
[56] *Ibid*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan dalam mengajar anak-anak tentang Ilmu Falak. Isinya bercerita tentang matahari dan segala planetnya yang dinamakan *journal stelsel*, tentang Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto, bintang Otarit, dan segala macamnya.[57] "Saya ceritakan, seolah-olah kita punya roket yang mempunyai kecepatan sekian ribu kilometer dalam satu jam. Kita berangkat ke bulan. Dari bulan kita pergi ke Merkurius, terus ke Zahra (Venus. ed). Dari Zahra pergi ke Mars, lalu ke Jupiter, begitulah selanjutnya", kata Idham Chalid ketika menceritakan kepada M. Dien Madjid.[58]

Selain itu, sebuah karya tentang parlemen yang ditulis ketika ia menjadi anggota DPRS-RI mewakili Kalimantan yaitu sebuah buku berjudul *Parlemen, Organisasi dan Tjaranya Bekerdja.* Buku ini berisi tentang sebuah pengantar dalam memahami parlemen dan fungsinya dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya sebagai pengantar, tetapi Idham juga membicarakan hal-hal teknis tentang tinjauan historis dan pengalaman Negara-negara lain dalam menjalankan Demokrasi. Buku tersebut diterbitkan tahun 1951 oleh penerbit Astanabuku Abede, Semarang.[59]

Ada pula booklet karya Idham Chalid yang berjudul *Islam dan Demokrasi Terpimpin*, yang pernah disampaikan Idham Chalid sebagai bahan-bahan kuliah di Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta. Diterbitkan oleh Endang Pemuda pada tahun 1965 di Jakarta. Buku ini

---

[57] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 159.
[58] *Ibid*, 159. Dokumen asli hasil wawancara dengan KH. Idham Chalid yang tersimpan di Arsip Nasional. Wawancara oleh M. Dien Madjid sebanyak 25 kali selama periode 13 Agustus 1985-2 Agustus 1986.
[59] Idham Chalid, *Parlemen, Organisasi dan Tjaranja Bekerdja* (Semarang: Astanabuku Abede, 1951).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiratkan pemikiran dan usahanya memahami Demokrasi Terpimpin dari perspektif agama.[60]

Buku lain karya Idham adalah *Mendajung dalam Taufan*, yang berisi tentang pidato-pidatonya di berbagai pertemuan resmi seperti Muktamar dan pernyataan sikap NU. Buku ini bagian dari dokumentasi resmi NU di masa-masa menjelang dan berlakunya Demokrasi Terpimpin. Buku ini diterbitkan tahun 1966 oleh penerbit Endang-Api Islam di Jakarta.[61]

Penghargaan yang pernah diperoleh Idham Chalid terkait dengan aktivitasnya, yaitu Bintang Gerilja dari Presiden Soekarno tahun 1956 atas perjuangannya sewaktu bersama-sama dengan kaum gerilyawan Kalimantan. Kemudian Bintang Vendera Yugoslavia dari Presiden Tito di tahun 1958, Bintang R. P. A. el-Gumhuriyjah Tingkat I tahun 1959, dan Bintang Mahaputra dari Presiden Soekarno di tahun 1960.[62]

Pemerintah Kalimantan Selatan juga sangat menghormati Kiai Idham. Nama Idham Chalid diabadikan menjadi nama Gedung Sekretariat serta Gedung Serba Guna di Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan pada 14 Agustus 2011.[63] Pada tahun 1983, Kiai Idham pernah ditawari untuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun ia menolaknya. Ia juga menolak ketika akan dianugerahi Ramon

[60] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 50.
[61] *Ibid*, 50.
[62] *Ibid*, 50.
[63] A. Muchlison Rochmat, "Beberapa Karya dan Penghargaan KH. Idham Chalid", dalam http://www.nu.or.id/post/read/89872 (NU Online, 03 Mei 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Magsaysay Award oleh pemerintah Filipina. Alasannya, Presiden Marcos kala itu tak berlaku demokratis dan menekan kaum muslim Moro.[64]

Di bidang akademis, Idham Chalid mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir dalam Pengetahuan Islam dan Perjuangan Islam pada tahun 1959.[65] Kemudian menjadi Ketua Dewan Kurator Institut Agama Islam Negeri tahun 1960.[66]

Pada tanggal 7 November 2011, berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Idham Chalid bersama dengan 6 tokoh lain sebagai Pahlawan Nasional. Ia merupakan putra Banjar ke-3 yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional setelah Pangeran Antasari dan Hasan Basry. Idham Chalid sebagai mantan Ketua Umum PBNU terlama selama 28 tahun, dan juga mantan Ketua MPR/DPR sangat pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena jasa-jasanya yang luar biasa bagi kepentingan bangsa, Negara dan agama.

Pada hari Senin, 19 Desember 2016, Bank Indonesia (BI) secara resmi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun emisi 2016 sebanyak 12 orang pahlawan nasional yang diabadikan dalam gambar muka uang baik uang kertas maupun uang logam. Gambar dan nama Dr. KH. Idham Chalid diabadikan dalam pecahan

[64] *Ibid.*
[65] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 50.
[66] *Ibid*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang NKRI baru Rp 5000,-an.[67] Begitu besar jasa-jasa beliau untuk bangsa, Negara, tanah air Indonesia dan agama Islam khususnya terhadap organisasi besar Nahdlatul Ulama, sehingga setelah beliau meninggal pun masih banyak penghargaan-penghargaan yang diberikan dari berbagai kalangan terhadap jasa-jasa dan perjuangannya.

Idham Chalid adalah ulama besar NU dan seorang politisi yang sangat berjaya pada masanya. Keaktifannya dalam organisasi sejak kecil mengantarkannya sampai pada deretan panjang jabatan yang pernah disandangnya. Tidak hanya pada organisasi keagamaan seperti NU saja, bahkan Idham Chalid pernah menjadi pimpinan tiga partai sekaligus, yaitu NU, Masyumi dan PPP. Dalam NU, sebgai Ketua Umum PBNU selama 28 tahun, Mustasyar PBNU, hingga jabatan terakhirnya sebagai Mudir 'Am Jam'iyyah Ahlith Thariqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah.

Perjuangannya mulai terlihat ketika Idham Chalid aktif dalam beberapa organisasai pergerakan melawan penjajahan Belanda dalam memperjuangakan daerah Kalimantan. Sejak tahun 1945, tercatat ia aktif menjadi anggota PRI (Persatuan Rakyat Indonesia), SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia), Sermi (Serikat Muslimin Indonesia), SOPIK (Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan) bersama Brigjen Hassan Basry yang membentuk Lasykar Saifullah, dan menjadi anggota Dewan Daerah Banjar yang kemudian menjadi delegasi Provinsi Kalimantan untuk ke Jakarta.

[67] Kompas.com. "Idham Chalid, Ulama dan Politisi Mumpuni di Pecahan Rp 5.000 Baru", dalam https://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/19/213000126/ (19 Desember 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riwayat perjuangan Idham Chalid di Kalimantan memang sangat terlihat dalam bidang pendidikan maupun pergerakan. Maka rakyat Kalimantan mempunyai peran sangat besar dalam pengajuan Idham Chalid sebagai Pahlawan Nasional. Berbagai penghargaan tidak mampu menggambarkan perjuangan Idham Chalid bagi rakyat Kalimantan maupun bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 7 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Idham Chalid sebagai Pahlawan Nasional. Tercatat bahwa Idham Chalid merupakan putra Banjar ke-3 yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional setelah Pangeran Antasari dan Hasan Basry.

Di tengah kegiatan politik dan keagamaannya, Idham Chalid juga memulai pembangunan dalam bidang sosial pendidikan yang berkaitan dengan amanat ayahnya dan keinginannya untuk membangun Lembaga Pendidikan Darul Ma'arif di daerah Cipete. Idham Chalid mulai merintisnya pada tahun 1954, dan perkembangan selanjutnya lembaga tersebut diresmikan tanggal 15 Desember 1959 sebagai Yayasan Darul Ma'arif yang terdiri dari jenjang pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah hingga Sekolah Tinggi Agama Islam. Ketika semua jabatan baik di pemerintahan maupun di NU telah sampai pada masanya, ia kembali pada aktifitas barunya sebagai pengasuh di Yayasan Darul Ma'arif yang telah didirikan. Ia menikmati kehidupan sehari-harinya disana untuk mengembangkan dan mengajar santri-santrinya di Yayasan Darul Ma'arif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HUBUNGAN NU DAN NEGARA PADA MASA DR. KH. IDHAM CHALID

A. Sejarah Singkat Awal NU

Berdirinya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 /26 Rajab 1344 H, merupakan perluasan dari Komite Hijaz yang sebelumnya dibentuk sebagai respon kaum tradisionalis untuk mengirim utusan ke Mekah. Berakhirnya kekuasaan Syarif Husein yang digantikan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Saud yang melakukan pembaharuan perilaku keagamaan sesuai dengan aliran Wahabi, mendorong kaum tradisionalis untuk memperjuangkan faham keagamaan dan praktek keagamaan yang sesuai dengan mayoritas umat Islam Indonesia dengan mengirimkan delegasi ke Mekkah. Hasil kunjungan tersebut adalah NU tetap diperbolehkan mengadakan ibadah dan pengajian berdasarkan Empat Madzhab di Masjidil Haram.[1]

Latar belakang berdirinya NU adalah sebuah bentuk perjuangan anti-penjajah. NU mengambil sikap tegas dalam urusan keagamaan dan tidak mengadukan campur tangan Belanda dalam urusan agama Islam. NU terlibat dalam Pemerintahan Hindia Belanda ketika peraturan pemerintahan mengenai guru-guru sekolah (*Guru Ordonnantie*), masalah warisan yang ditarik dari wewenang Pengadilan Agama, dan perumusan tata cara pelaksanaan hukum

[1] Abdul Basit Adnan, *Kemelut Di NU: Antara Kiai Dan Poltisi* (Solo : CV Mayasari, 1982), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. NU juga terlibat masalah politik dalam pengangkatan penghulu.[2] Lewat para aktivis mudanya seperti Mahfudz Shiddiq dan Wahid Hasyim, NU terlibat dalam perjuangan nasional melawan pemerintah kolonial Belanda.[3]

Pada tanggal 21 September 1937, organisasi islam (NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PSII, Al-Khoiriyah, PUI, Persis, dsb) bersatu membentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Eksistensi MIAI pasca-penjajahan Belanda masih diakui oleh Jepang. Dengan tujuan lebih mengarah dan sesuai dengan perkembangan zaman, MIAI dibubarkan tahun 1943 dan diganti dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang menyatakan siap membantu kepentingan Jepang. Pelopor didirikannya Masyumi ini adalah Abdul Wahid Hasyim.[4] Hanya Muhammadiyah dan NU yang diakui secara sah untuk menjadi anggota dan memimpin Masyumi. Pada bulan Agustus 1944, Kiai Hasyim Asy'ari diangkat sebagai ketua *Shumubu* (Kantor Urusan Agama Islam buatan Jepang). Pada tahun yang sama, Wahid Hasyim juga berhasil membujuk pihak Jepang untuk memberikan latihan militer khusus bagi para santri dan mengizinkan mereka membentuk barisan pertahanan rakyat sendiri, yaitu *Hizbullah* dan *Sabilillah*.[5]

Agama Islam hanya mendapatkan sedikit keuntungan yang nyata Selama pendudukan Jepang. Sejak April 1944, setiap Karesidenan dapat

---

[2] Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik* (Sidoarjo: Al-Maktabah, 2011), 3.
[3] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 19.
[4] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 16.
[5] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka Kantor Urusan Agama (*Syuumuka*) hingga Pengadilan Agama semakin menjangkau kehidupan desa. Islam tradisionalis banyak mendapat pengakuan dan posisi, terutama pengalaman di bidang pemerintahan. NU telah meraih peran nasional berkat pengaruhnya di kalangan masyarakat desa.[6]

B. NU Pada Masa Orde Lama

1. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membuka kesempatan bagi segenap rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Pada Muktamar Islam Indonesia tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta, Masyumi ditetapkan sebagai partai politik satu-satunya bagi umat Islam. Hasil Muktamar NU di Purwokerto 1946, NU menyerukan kepada warganya untuk ikut serta dalam partai politik Masyumi hingga diputuskan NU menjadi tulang punggung Masyumi.[7]

Di sisi lain, pada bulan Mei 1945, Soekarno dengan tiga pemimpin muslim, yaitu Kiai Wahid Hasyim, Kiai Masykur, dan Kiai Kahar Muzakkir dari Partai Islam Indonesia (PII) berdiskusi mengenai sumbangan agama Islam terhadap definisi Pancasila. Dua hari setelah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Moh. Hatta. Sore harinya Moh. Hatta menerima telepon dari Nishiyama, pembantu Admiral Maeda, yang menyatakan kesediaan Hatta menerima pernyataan

[6] *Ibid*, 29.
[7] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang menyatakan keberatan-keberatan penduduk dari Indonesia Timur yang tidak beragama Islam mengenai dimuatnya Piagam Jakarta pada Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Karena hal itu menyebabkan mereka yang tidak beragama Islam merasa didiskriminasi dalam negara baru yang akan dibentuk jika tujuh kata pada sila pertama tetap dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.[8] Pada rapat anggota PPKI tanggal 18 Agustus atas usulan Wahid Hasyim, rujukan agama islam dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, kata Esa menggarisbawahi Ke-Esaan Tuhan (Tauhid).[9]

Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi Negara Islam, namun menjadi Negara monotheis. Presiden harus di angkat dari orang Indonesia asli, tanpa ketentuan jelas mengenai agamanya. Presiden juga Wakil Presiden bebas memilih upacara pengambilan sumpah jabatan, secara keagamaan atau janji. Dalam peristiwa tersebut, NU menduduki posisi yang menentukan dalam perdebatan bentuk Negara Indonesia. NU bersedia mencari jalan keluar dengan agama lainnya, karena menurut Wahid Hasyim yang paling dibutuhkan Indonesia pada saat itu adalah persatuan bangsa yang kuat.[10]

Pasukan Inggris yang kembali mendarat di Jawa sejak September 1945 berusaha untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Hindia

---

[8] Muhammad Subarkah, "Soal Telepon dari Pembantu Admiral Maeda", dalam https://m.republika.co.id/berita/selarung/suluh/16/06/21/ (22 Juni 2016).
[9] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 39.
[10] *Ibid*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanda. Para ulama NU berkumpul pada tanggal 22 Oktober 1945 dan menyatakan Perang Jihad (*Djihad fi Sabilillah*) melawan sekutu Inggris-Belanda. Sebagian besar para ulama bergabung dalam pertempuran melawan penjajah. Pesantren-pesantren sering dijadikan tempat berlindung dan berkumpul pasukan *Hizbullah* dan *Sabilillah.*[11]

Sesudah kemerdekaan, terjadi perubahan sistem Demokrasi Presidensial di tangan Presiden Soekarno menjadi sistem Demokrasi Parlementer, yaitu jayanya partai politik.[12] Mulai tahun 1946, NU mulai mengambil bagian dalam pemerintahan dengan jabatan Menteri Agama yang diberikan kepada Abdul Wahid Hasyim, yang sebelumnya dijabat oleh M. Rasjidi BA dari Muhammadiyah sebagai Menteri Agama pertama. Posisi ini merupakan kunci yang sangat menguntungkan bagi NU dalam jangka panjang karena memberikan landasan yang sah bagi aktivitas sosial-keagamaan.[13]

2. Masa Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950 sampai 1959 disebut masa demokrasi liberal, karena dalam politik maupun ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Dalam pemerintahan yang baru, Wahid Hasyim di angkat kembali menjadi Menteri Agama, namun NU sangat sulit mendapatkan posisi karena kadernya sedikit dan dukungan dari kaum muslim modernis tidak banyak. Ketidaksepahaman memicu putusnya hubungan antara kaum

[11] *Ibid*, 42.
[12] Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno, Pemikiran Politik Dan Kenyataan Praktek,* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1993), 74.
[13] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional dan kaum pembaharu yang semakin menunjukkan sikap merendahkan ulama. Akibatnya, NU memisahkan diri dari Masyumi dan mendirikan partai politik pada tahun 1952.[14]

Perlahan, NU mampu merekrut kader politik untuk memperkuat jajarannya melalui pengusaha, praktisi hukum, para ahli ekonomi, tanpa mempermasalahkan hubungan mereka dengan NU. Partai NU semakin kuat dengan sayap politisnya. Pada bulan Juli 1953, NU masuk dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dipimpin oleh PNI dan didukung oleh PKI. Disitu NU tidak hanya mendapat jabatan sebagai Menteri Agama, tetapi juga sebagai Menteri Pertanian dan Wakil Perdana Menteri. Atas jabatan tersebut NU semakin dekat dengan Presiden Soekarno.[15]

Pada tahun 1954, sebuah konferensi para ulama yang diselenggarakan di Cipanas, Jawa Barat, dibawah pimpinan Menteri Agama, Kiai Masykur telah mengangkat Presiden Soekarno sebagai *"Waliyyul amri ad-dlaruri bisy-syaukah",* yaitu Soekarno serta alat-alat Negara yang dimaksud UUD pasal 44, yakni kabinet, parlemen dan sebagainya sebagai seorang Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang sah secara *de facto*.[16] Pemberian gelar ini merupakan inisiatif para ulama NU untuk memberikan wewenang pemerintahan dari para ulama atau Lembaga Keagamaan kepada Soekarno.[17]

---

[14] *Ibid*, 45.
[15] *Ibid*, 47.
[16] Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*, 317.
[17] Abdul Basit Adnan, *Kemelut Di NU*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjelang Pemilu 1955, NU tetap gigih mengadakan propaganda dalam berkampanye melawan PKI. Ketika PKI hendak menggunakan tanda gambar "palu arit" dengan tambahan kalimat "PKI dan Orang-orang tak berpartai", Idham Chalid sebagai juru bicara NU memprotes rencana tersebut dan berhasil digagalkan.[18] Dan pada pemilu tahun 1955, NU sukses mendapat peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi, dan mampu mengungguli PKI. NU mendapat 45 kursi, dari sebelumnya hanya 8 kursi di DPRS. KH. Idham Chalid yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen PBNU, tampil menjadi anggota DPR. NU mulai berperan besar bersama kaum nasionalis, pembaharu, komunis dan ABRI.[19] Pada tahun 1956, Majelis Konstituante didirikan untuk membuat undang-undang dasar menggantikan UUD Sementara 1950. KH. Idham Chalid terpilih menjadi anggota Majelis Konstituante.[20]

Pada bulan Maret 1956, Idham Chalid kembali terpilih dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan koalisi PNI-Masyumi-NU dengan jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri II.[21] Idham Chalid mengundurkan diri dari DPR karena ketentuan waktu itu seorang menteri tidak bisa merangkap menjadi anggota parlemen.[22] Dalam pembentukan kabinet, Presiden Soekarno menghendaki adanya kabinet "berkaki empat" yang terdiri dari Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Tentunya semua partai menolak,

---

[18] Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU* (Surabaya : PT Duta Aksara Mulia, 2010), 271.
[19] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 41.
[20] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 361.
[21] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 41.
[22] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama partai agama seperti Masyumi, NU, Katholik, dan Parkindo. Di sisi lain, kabinet parlementer yang sudah dibentuk harus dibawa ke parlemen untuk meminta mandat kepercayaan dari parlemen, sedangkan semua partai besar tidak dapat menerima PKI dalam kabinet. Ali Sastroamidjojo berjuang mati-matian untuk bernegoisasi dengan partai-partai dan hasilnya semua partai tetap tidak bisa menerima PKI.[23]

Idham Chalid, Kiai Wahab Hasbullah dan Zainul Arifin berusaha menjelaskan dan berdiskusi panjang dengan Presiden Soekarno dan mengatakan bahwa pengalaman selama ini menunjukkan PKI selalu menyalahgunakan kesempatan, sehingga kekhawatiran terjadi lagi seperti klimaksnya pada pemberontakan PKI di Madiun. Idham Chalid mengatakan bahwa NU tidak akan ikut dalam kabinet jika PKI tetap dimasukkan. Akhirnya dengan perdebatan panjang, pada tanggal 16 Maret 1956, kabinet Ali berhasil menyusun format kabinet tanpa PKI. Presiden menanggapi hasil susunan kabinet tersebut dengan kemarahan. Ali tetap menjelaskan bahwa tidak mungkin membentuk kabinet koalisi dengan PKI karena partai besar Masyumi dan NU menolaknya. Akhirnya anggota kabinet berhasil dilantik, tetapi dalam pengambilan sumpah anggota Presiden Soekarno hanya diam dan enggan untuk memimpinnya[24].

Dengan tanggungjawab sebagai Wakil Perdana Menteri II dan merangkap Kepala Badan Keamanan, Idham Chalid sering turun ke daerah-daerah yang masih terganggu keamanannya. Tugasnya yang

[23] *Ibid*, 287.
[24] *Ibid*, 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling berat adalah ketika menghadapi kelompok Darul Islam Kartosuwiryo di Jawa Barat, Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, dan Tengku Daud Beureuh yang menamakan dirinya Panglima Wilayah Divisi V TII. Apakah perjuangan mereka dengan membawa dalih-dalih agama islam itu akan membawa keuntungan bagi masyarakat atau malah sebaliknya. Hal itu yang menjadi permasalahan utama Idham Chalid dalam mengatasi masalah tersebut. Idham Chalid selaku Kepala Badan Keamanan membentuk Kiai-kiai Pembantu Keamanan (KPK) untuk dimintai pemikiran, pendapat dan bantuan dalam memecahkan masalah tersebut.[25]

Pada Muktamar NU ke-21 yang di selenggarakan di Medan, Sumatera Barat pada bulan Desember 1956, Idham Chalid terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, menggantikan M. Dachlan yang memegang jabatan sejak April 1953.[26] Pada tanggal 9 Januari 1957, Masyumi mengundurkan diri dari Kabinet dan menuntut Ali agar diganti oleh kabinet non-parlementer yang dipimpin Hatta. Presiden Soekarno memberhentikan Mr. Moh. Roem dari Masyumi dengan hormat. Sejak saat itu nama kabinet menjadi Kabinet Ali-Idham, karena PNI dan NU masih mendukung Kabinet Ali.[27] Semula Idham Chalid dan Ali juga berfikir untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Namun, presiden mengancam jika itu benar-benar terjadi, maka ia akan mengumumkan SOB (*Staat van Oorlog en van Beleg*), yang artinya

[25] *Ibid*, 300.
[26] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 42.
[27] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara dalam keadaan bahaya dan darurat perang.[28] Itulah sebabnya Ali dan Idham memutuskan bertahan dengan harapan agar seluruh kekuasaan Negara tidak jatuh ke tangan militer dengan berlakunya SOB.

Ketika Perti juga menarik menteri-menterinya dari kabinet, terjadi perbedaan pandangan antara Ali dan Idham dalam penyelesaian masalah di kabinet. Idham masih menginginkan agar pemerintah menjalankan kebijakan dengan melibatkan Presiden, sedangkan Ali tidak menginginkan hal tersebut.[29] Di tengah permasalahan kabinet, pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno mengeluarkan Konsepsi Presiden dengan judul "Menyelamatkan Republik Proklamasi" yang menyatakan bahwa pengalaman selama 11 tahun dengan Sistem Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Liberal tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Dalam sistem Demokrasi tersebut membuat bangsa Indonesia menderita karena dinilai prinsip oposisi diartikan dengan menentang pemerintah secara hebat. Maka Soekarno menyatakan bahwa yang sesuai dengan kepribadian Indonesia adalah Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari semua unsur golongan dalam masyarakat.[30] PKI dan PNI menyetujui konsepsi Soekarno. Namun, Masyumi dan Partai Katolik menolak dengan tegas, sedangkan NU, PSI, dan partai-partai lainnya menolak secara kurang tegas.[31]

---

[28] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 328.
[29] *Ibid*, 329.
[30] Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno, Pemikiran Politik Dan Kenyataan Praktek*, 80.
[31] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Sidang Pleno tanggal 9-10 Maret 1957, NU bersama konsul-konsulnya se-Indonesia menyetujui konsepsi Presiden, dengan syarat: Dewan Nasional hanya berfungsi sebagai penasehat dan tidak mempunyai konsekuensi politis dan pembentukannya dilakukan oleh Kabinet bersama Kepala Negara. NU khawatir terhadap persekutuan yang semakin erat antara Soekarno dengan PKI, dan akhirnya menolak usulan Kabinet Gotong Royong dengan PKI. Kiai Wahab menilai bahwa Soekarno terlalu berambisi untuk menyatukan partai-partai yang sejak semula mempunyai unsur-unsur berbeda dan mustahil untuk diwujudkan.[32] Presiden Soekarno mengatakan kepada Idham Chalid bahwa dukungan NU sangatlah penting bagi dirinya. Keputusan NU dalam menerima konsepsi tersebut adalah tujuan utamanya agar partainya terwakili dalam formatur. Ketika PBNU sangat yakin bahwa tujuan tersebut akan tercapai, kenyataannya Soekarno hanya memanipulasi partai NU untuk mendapatkan dukungan atas konsepsinya. Karena dengan NU mendukungnya, maka partai-partai dibawahnya juga akan ikut serta mendukungnya.[33] Kekecewaan NU benar-benar memuncak pada tanggal 13 Maret 1957, PNI dan NU sepakat untuk menyerahkan mandat kabinet Ali kepada Presiden Soekarno.[34] Kemudian Soekarno mengeluarkan SOB yang menyatakan bahwa Negara dalam keadaan darurat perang. Selanjutnya Soekarno membentuk Kabinet dengan menunjuk Suwirjo dari PNI sebagai formatur. Untuk mendapatkan jabatan penting dalam kabinet

[32] *Ibid*, 52.
[33] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, 246.
[34] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baru, NU tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan tawar-menawar dengan Suwirjo. Tetapi kabinet menemukan jalan buntu dalam pembentukannya karena Soekarno dan PNI tetap menghendaki PKI masuk dalam kabinet. Akhirnya Suwirjo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 1 April 1957.[35]

Pada tanggal 9 April 1957, Presiden Soekarno berhasil membentuk sebuah kabinet baru dibawah pimpinan Ir. Djuanda Kartawidjaja yang merupakan koalisi PNI-NU, yang disebut Kabinet Karya.[36] Idham Chalid terpilih kembali sebagai Wakil Perdana Menteri.[37] Salah satu program Kabinet Karya adalah membentuk Dewan Nasional yang berlaku dalam UUDS 1950 (sejenis dengan DPA).[38]

Kekuasaan ABRI meningkat ketika beberapa pemberontakan meletus setelah tahun 1956. Sebagai partai agama, NU mengkhawatirkan pertumbuhan komunis yang semakin kuat.[39] Ikut sertanya militer dalam politik, menetralisir peranan partai-partai politik, khususnya PKI yang kala itu tengah berada di puncak. Pentas politik nasional hanya diisi oleh tiga kekuatan, yaitu Militer (AD), Soekarno dan PKI.[40] Dalam Kongres NU ke-22 tanggal 13-18 Desember 1959 di Jakarta, Idham Chalid selaku Ketua Umum PBNU menjelaskan mengenai diumumkannya SOB oleh Presiden Soekarno, mengapa NU ikut dalam kabinet, mengapa Kabinet

[35] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, 247.
[36] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 52.
[37] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid : Guru Politik Orang NU*,43.
[38] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 338.
[39] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 49.
[40] Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno, Pemikiran Politik Dan Kenyataan Praktek*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali II bubar, dan terjadinya perbedaan kebijaksanaan politik diantara pimpinan kabinet. Dalam pembentukan Kabinet Karya, NU tidak punya pilihan lain selain menyatakan bersedia untuk bergabung dengan Presiden Soekarno. Karena jika menolak tawaran Soekarno tersebut, akan sangat membahayakan partai, dan bukan hanya partai NU. Atas pertimbangan itulah PBNU memberi izin kepada para anggotanya untuk duduk dalam Kabinet Karya.[41]

Dalam Kabinet Karya, ada empat perwakilan dari orang NU, yaitu KH. M. Ilyas sebagai Menteri Agama, Prof. Soenarjo sebagai Menteri Perdagangan yang kemudian diganti oleh Drs. Rachmat Muljoamiseno, kemudian setelah *reshuffle* masuk pula KH. M. Wahid Wahab sebagai Menteri Urusan Kerjasama Sipil dan Militer, dan Idham Chalid sebagai Wakil Perdana Menteri II yang juga merangkap menjadi Kepala Biro Keamanan. Di samping Kabinet Karya tetap melaksanakan program pembangunan. Idham Chalid sebagai Kepala Biro Keamanan juga bertanggung jawab terhadap keamanan Negara.[42]

Majelis Konstituante yang di bentuk pada tahun 1955 sampai di bubarkannya pada tahun 1959, tidak membawakan hasil apa-apa. Sebuah perdebatan panjang terjadi dalam Majelis Konstituante mengenai kedudukan Pancasila dan UUD 1945. Kiai Masykur menegaskan bahwa Pancasila adalah sebuah penyederhanaan yang tidak mempunyai arti dan

[41] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 342.
[42] *Ibid*, 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diberi arti.[43] Pada tahun 1958, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution mengusulkan untuk kembali kepada UUD 1945, karena didalam UUD ini ada pasal yang menyebut perwakilan golongan yang dianggap membenarkan adanya wakil-wakil ABRI di DPR dan Kabinet. Soekarno mengkhawatirkan meningkatnya peranan ABRI, tidak menyetujui usul ini. Soekarno mengusulkan kembali kepada UUD 1945 dengan syarat Piagam Jakarta diakui sebagai bagian dari UUD. Partai Islam dan golongan netral agama tidak menyetujui usulan tersebut. Ketika Konstituante memilih untuk tidak menerima Piagam Jakarta, NU berbalik menolak UUD 1945. Pada tanggal 29 Mei, pemungutan suara dimulai untuk mendapatkan kesepakatan. Pada bulan yang sama, ketika terjadi pemberontakan Darul Islam di Aceh, sikap Nasution dan Soekarno semakin kuat untuk kembali ke UUD 1945.[44]

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968)

Setelah Dekrit Presiden diumumkan, sejak itulah Demokrasi Terpimpin ditegakkan. KH. Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri memberikan lampu hijau pada keputusan Presiden Soekarno, dengan satu permintaan agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya sebagai yang menjiwai UUD 1945.[45] Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan mendekritkan berlakunya UUD 1945 dan secara eksplisit ia menyatakan meyakini piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan

[43] *Ibid*, 359.
[44] *Ibid*, 360.
[45] Nazaruddin Sjamsuddin (ed), *Soekarno, Pemikiran Politik Dan Kenyataan Praktek*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi tersebut.[46] KH. Wahab Hasbullah selaku Rais ‘Am PBNU juga mendukung gagasan Soekarno. Pimpinan PBNU di tingkat Tanfidziyah seperti KH. A. Syaichu, KH. Masykur, dengan mudah menyesuaikan diri dengan konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno. Sementara itu, tokoh NU yang menolak dengan tegas adalah KH. Bisri Syansuri, KH. Ahmad Siddiq, KH. M. Dahlan, dan Imron Rosyadi.[47]

Pemikiran KH. Idham Chalid terhadap Demokrasi Terpimpin, yaitu Demokrasi didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia adalah anggota masyarakat yang bebas dan memiliki hak yang sama. Lawan dari Demokrasi adalah Oligarki, yaitu pemerintahan oleh segolongan kecil yang berkuasa. Demokrasi bersandar pada hak suara setiap anggota masyarakat yang sudah dewasa untuk memilih parlemen, badan perwakilan segala partai, agama dan sebagainya yang termaktub dalam UUD. Hakikat demokrasi adalah menghormati pendapat golongan minoritas dan inilah yang membedakan dengan diktatur.[48] Selain itu, Idham Chalid juga memaparkan pemikirannya bahwa demokrasi sangatlah berkaitan dengan musyawarah. Musyawarah dalam tradisi Islam sudah banyak ditemukan baik pada teks-teks suci Al-Qur’an dan Hadits, jejak para sahabat maupun karya para ulama, sebagai bukti-bukti “Demokrasi dalam Islam”. Dan Demokrasi dalam Islam adalah

[46] *Ibid*, 361.
[47] Hidayatullah, Rasyid. *Demokrasi Terpimpin Menurut KH. Idham Chalid Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*, 5.
[48] Idham Chalid, *Islam Dan Demokrasi Terpimpin*, 31. Dalam Ahmad Muhajir, *Idham Chalid : Guru Politik Orang NU*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah (*syura*).[49] Pemikiran itulah yang membuat Idham Chalid sebagai pimpinan partai NU menerima dan memilih bekerja sama dengan rezim Soekarno.[50]

Pada tanggal 9 Juli 1959, susunan Kabinet Karya di bentuk dengan Soekarno sebagai Perdana Menteri. Menteri-menteri anggota Kabinet Karya tidak lagi dianggap sebagai kader partai politik.[51] Pada tanggal 17 Agustus 1959, Soekarno mengumumkan ideologi Demokrasi Terpimpin yang kemudian disebut *Manipol*-Usdek (UUD 45, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Disamping itu Dewan Nasional diganti dengan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan satu Dewan Perancang Nasional dibentuk. Masyumi dan PSI tidak termasuk didalamnya. Idham Chalid diangkat menjadi anggota DPAS yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Pemerintah. Dewan ini lebih berpengaruh dari pada parlemen pada waktu itu.[52]

Pada awal tahun 1960, semua partai politik diminta mengubah anggaran dasarnya dan secara jelas menyatakan menerima Pancasila. Selain itu, semua partai juga harus memiliki wawasan nasional dan tidak boleh terlibat dalam pemberontakan apapun, dan juga akan dipersiapkan dalam pembentukan Majelis Permusyawaran Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari 94 wakil daerah (DPR) dan 200 wakil Golongan

[49] *Ibid*, 72.
[50] *Ibid*, 89.
[51] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 361.
[52] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid : Guru Politik Orang NU*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsional.[53] Ketika DPR mengancam untuk tidak menyetujui anggaran Negara, Soekarno langsung membubarkannya pada bulan Maret 1960. Sebagai reaksi, PSI dan Masyumi membentuk Liga Demokrasi. Pada bulan Juni, Soekarno membentuk dewan baru dengan nama DPR Gotong Royong yang separuh anggotanya diambil dari partai politik dan separuh lainnya dari Golongan Karya. Di DPR yang baru ini terdapat wakil NU sebanyak 34 orang, PNI 44, PKI 30, dan 34 diantaranya dari Angkatan Bersenjata. Sedangkan Masyumi dan PSI tidak mendapatkan kursi.[54]

Menghadapi pembubaran DPR dan pembentukan DPR Gotong Royong, NU khawatir akan membawa akibat masa *vacuum* yang membahayakan demokrasi. Karena itu PBNU memberi dukungan dan kepercayaan kepada KH. Idham Chalid untuk menghadiri undangan Presiden Soekarno ke pertemuan puncak Tampak Siring yang dihadiri oleh Suwirjo (PNI), Aidit (PKI), Roeslan Abdul Ghani (Ketua DPAS).[55] Pertemuan ini dinilai NU merupakan hal baik, karena merupakan jalan yang dapat ditempuh demi berlakunya demokrasi dan kepartaian. Alasan NU menerima pembentukan lembaga perwakilan rakyat hasil pertemuan puncak Tampak Siring merupakan alternatif sementara yang dapat diterima karena masih melibatkan partai politik.

Memang diakui bahwa perwakilan rakyat yang dibentuk lewat keputusan Presiden dan tidak didasarkan musyawarah dengan partai-partai politik bukanlah asas demokrasi. Tetapi pada kasus tersebut, tidak

[53] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 363.
[54] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 60.
[55] Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin segera diwujudkan dengan berbagai alasan mengenai kondisi keamanan Negara. Sehingga menerima hasil Tampak Siring dinilai sebagai alternatif bahaya yang paling ringan atau keburukannya sesuai dengan dalil kaidah fikih '*iza ta'ārada mafsadatāni rū'iya a'zamuhā dararan bi irtikā akhafihimā'*, jika terjadi benturan dua hal yang buruk, dipertimbangkan yang lebih besar buruknya, dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya. Tetapi NU masih tetap menuntut diselenggarakannya pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang representatif.[56]

Keikutsertaan NU dalam DPR Gotong Royong, menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama NU. Di satu pihak, KH. Bisri Syansuri, KH. Dahlan, KH. Ahmad Siddiq, dan Imron Rosyadi menganggap bahwa DPR Gotong Royong anti-Demokrasi. Sehingga anggota DPR yang tidak seluruhnya dipilih oleh rakyat bertentangan dengan fikih. Di pihak lain, KH. Wahab Hasbullah memaparkan bahwa NU tidak punya pilihan lain, karena NU harus ikut dalam DPR untuk membetulkan kesalahan-kesalahan pemerintah yang dibentuk menurut prinsip Al-Qur'an. Dalam Siaran ke VII PBNU yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. Idham Calid dan Sekjen PBNU KH. Saifuddin Zuhri, dengan tegas menyatakan bahwa kebijkan NU memberikan kesempatan anggotanya yang ditunjuk Kepala Negara untuk duduk dalam Kabinet Karya dan Dewan Nasional, lebih didasarkan untuk mencegah *madharat*

[56] *Ibid*, 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih besar daripada mencari kebalikan sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi, '*Dar'al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-masālih'*, menghindari bahaya didahulukan daripada melaksanakan kewajiban yang baik.[57]

Meski Syuriah NU tetap tidak setuju dengan keputusan Idham Chalid, tetapi masih bisa menerima agar anggota partai Islam ditambah. Setelah permintaannya tidak dikabulkan, ia menyerahkan kepada para anggota DPR NU untuk memutuskan sendiri keikutsertaannya masing-masing. Kiai Masykur yang setuju dengan masuknya NU di parlemen, meminta Kiai Bisri untuk mengundi dengan kertas. Kertas yang terakhir diambil Kiai Bisri bertuliskan 'ikut', yang artinya sebagai izin untuk menjadi anggota DPR. Sedangkan Imron Rosyadi dan Moh Dahlan memilih tetap bergabung dalam Liga Demokrasi penentang Demokrasi Terpimpin. Imron Rosyadi dan beberapa elemen PSI menginginkan Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan dan membubarkan PKI.[58]

Pada bulan April 1961, NU secara resmi mendapat pengakuan diantara delapan partai politik yang diizinkan pemerintah. Sejak Masyumi dan PSI secara resmi dilarang pada Agustus 1960 karena keikutsertaannya dalam pemberontakan PRRI dan Permesta, NU menjadi satu-satunya partai kaum tradisionalis diantara partai-partai islam dalam panggung politik. Ketika Soekarno mengemukakan semboyan persatuan Nasakom, NU menilai gagasan tersebut digunakan untuk memantapkan kedudukan

[57] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 363 dan Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*, 362.
[58] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PKI dalam mengimbangi ABRI. Sementara itu, posisi NU sangat dekat dengan ABRI karena keduanya memiliki kekhawatiran terhadap PKI.[59]

Pada tahun 1963, Idham Chalid merupakan pemimpin partai politik satu-satunya yang membela organisasi bentukan ABRI untuk karyawan yang bukan komunis. Organisasi tersebut dikenal dengan SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia). Kemudian Ia menyerukan kerjasama antara NU dan SOKSI. Atas kerjasama tersebut, hubungan NU dan militer bertambah erat. Kebijakan *landreform* yang disetujui DPR-GR pada tahun 1960 tentang undang-undang pembagian hasil panen, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah tahun 1962, mengancam kepentingan para pemilik tanah dari kalangan warga NU. *Landreform* secara khusus merugikan para ulama yang memiliki tanah luas (termasuk wakaf) atau yang diserahi tanah orang lain yang berusaha menghindari penyitaan. Ketika NU memutuskan untuk bereaksi terhadap aksi buruh tani yang terorganisir dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk melaksanakan *lanfreform*, mereka mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan ABRI.[60]

Pada tahun 1964, bentrokan semakin sering terjadi antara Banser dan BTI, terutama di Jawa Timur. Usaha Presiden Soekarno untuk meredakan konflik tersebut tidak berhasil. Pada bulan Agustus-September, ketika Soekarno memilih konfrontasi dengan Malaysia ketimbang bantuan IMF, kondisi ekonomi Indonesia sudah melemah

[59] *Ibid*, 365.
[60] *Ibid*, 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah pengambilan perusahaan-perusahaan Belanda. Konteks internasional juga ikut memainkan peran dalam menarik Soekarno ke kiri. Pada bulan Mei 1965, Kolonel Boumedienne yang berhaluan kiri mengambi alih kekuasaan di Al-Jazair, sedangkan Amerika mesti menambah pasukannya di Vietnam Selatan. Hal ini juga berakibat pada kondisi politik tanah air semakin menegangkan.[61]

Kondisi kesehatan Soekarno mulai melemah sejak bulan Agustus. Isu tentang sakitnya Soekarno, mengenai kudeta yang disiapkan oleh PKI atau sebagian ABRI, mengenai persiapan persenjataan partai politik, ketegangan munculnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan situasi ekonomi, semuanya bergabung menyiapkan NU bagi peristiwa yang penting. Puncak dari berbagai ketidakpastian ini adalah pada 30 September 1965, ketika terjadi penculikan terhadap enam Jenderal Angkatan Darat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pangkostrad Jenderal Soeharto, menggilas gerakan tersebut. Bagi NU, saat-saat itu merupakan dilema besar, antara rasa permusuhan dengan PKI dan rasa sayang terhadap Presiden Soekarno yang tidak mau melarang PKI.[62]

Situasi politik Indonesia semakin memanas pada akhir tahun 1965. Dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang semakin lemah, tampak semakin pudar pula kekuasaan yang dimilikinya. NU yang sudah bertahun-tahun menjalin hubungan istimewa dengan Soekarno, mengalami perpecahan sikap. Para pimpinan puncak NU seperti KH.

[61] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 64.
[62] *Ibid*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab Hasbullah, KH. Idham Chalid, Saifuddin Zuhri dan Masykur masih berpihak kepada Soekarno dan menentang seruan kepada presiden agar melarang PKI. Sementara tokoh NU lainnya seperti Subchan ZE, Ahmad Sjaichu, Moh Dahlan dan juga Jusuf Hasyim lebih tegas menyatakan posisinya sebagai anti-komunis dan menuntut agar PKI dilarang.[63] Perihal mengapa Soekarno lebih dekat dengan PKI dari pada partai Islam, penilaian Soekarno terhadap partai Islam yang apabila membesar dan bersikap radikal, lazim disebut radikal kanan yang akan sangat berbahaya dibandingkan radikalismenya Komunis, yang lazim disebut radikal kiri.[64]

Peranan penting pada hari-hari itu di tubuh NU, dimainkan oleh Subchan ZE yang bangkit sebagai salah seorang pengorganisasi demonstrasi mahasiswa yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno dan mengantarkan kelahiran Orde Baru. Subchan membentuk Komando Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP-Gestapu). Subchan, sebagai tokoh yang berkaitan dengan sejarah NU dan proses kelahiran Orde Baru, telah memainkan peranan penting sebagai penghubung NU dengan kekuatan-kekuatan lain, khususnya fraksi militer dan kekuatan anti-komunis lainnya.[65] Namun, pemerintah khususnya golongan militer merasa sangat khawatir jika NU masih berkeinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara. Hal ini terlihat pada pertemuan Dewan Pimpinan Pusat

[63] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 366.
[64] Imam Ibnu Hajar, *Islam Politik Di Era Orde Lama Dan Orde Baru: Telaah atas Aksi dan Reaksi Tokoh-tokoh Islam* (Majalah Al-'Adalah, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol 10 No. 1, April 2007), 69.
[65]Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai NU di Bogor bulan April 1966, NU mengumumkan bahwa, "Negara berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan dari Piagam Jakarta, maka terbukalah jalan untuk menerapkan cita-cita partai. Selanjutnya, jika Pancasila dan UUD 1945 dijalankan dengan benar dalam masyarakat, hasilnya adalah sebuah masyarakat yang sesuai dengan cita-cita partai." Pada sidang MPRS 1966, NU sukses dengan keputusan sidang yang mewajibkan pendidikan agama di sekolah-sekolah, meskipun harapan untuk kembali ke Piagam 45 tidak tercapai, tetapi keputusan tersebut cukup memberikan sumbangsih yang signifikan dalam proses islamisasi di kepulauan Nusantara ini.[66]

Pada tahun 1965, Idham Chalid bersama dengan Subhan ZE tampak mengatur strategi untuk membangun semangat dalam memperjuangkan Islam untuk Revolusi Indonesia. Ia mempublikasikan tulisannya dalam Majalah Api Islam bahwa Revolusi Indonesia tidaklah sama dengan Revolusi Turki pada umumnya yang berpedoman pada ilmu pengetahuan dan menjadikan agama Islam sebagai alat untuk melemahkan rakyatnya. Para pemimpin Negara yang selalu membawa dalih-dalih agamanya sebagai alat untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Berbeda dengan Revolusi Indonesia, para tokoh Islam dalam perjuangannya, semuanya adalah pemeluk-pemeluk agama yang setia dan taat kepada ajaran agamanya. Bahkan pemberontakan mereka melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme merupakan bukti karena

[66] Imam Ibnu Hajar, *Islam Politik Di Era Orde Lama Dan Orde Baru*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa dan semangat ajaran agama yang mendarah daging dalam tubuhnya. Pada permulaan revolusi, fisik para ulama justru menjadi sumber fatwa dengan dicetuskannya Resolusi Jihad Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 yang membakar semangat perjuangan melawan penjajah.[67] Dalam tulisannya tersebut, Idham Chalid memberikan gambaran kepada rakyat Indonesia tentang pemimpin-pemimpin Negara yang sangat berpengaruh dalam Revolusi Indonesia selanjutnya. Pada masa itu, NU terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok konservatif yang dipimpin oleh Idham Chalid dan para Kiai senior yang masih setia mendukung Soekarno, dan kelompok radikal NU penentang keras Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Subchan ZE. Namun, pada Muktamar NU di Bandung pada tahun 1966, Idham Chalid terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU, dan Subchan ZE terpilih menjadi Ketua I PBNU.

Munculnya Pangkostrad Jenderal Soeharto sebagai perwira paling senior dalam penumpasan percobaan kudeta Soekarno menjadi titik awal munculnya dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Pendukung utama Soeharto adalah pihak militer TNI yang memandang legitimasi berasal dari tugasnya sebagai pembela Negara Pancasila sebuah Negara non-komunis dan non-islam. Pada akhir 1965 hingga awal 1966, menghadapi penegakan masalah legitimasi, perlahan kekuasaan diambil alih oleh Soeharto. Soeharto meyakinkan bahwa pada pemerintahan yang baru ini adalah pewaris yang sah dan

[67]Idham Chalid, *Haluan Politik Negara* (Majalah Api Islam, No. 6, 1 Agustus 1965), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusional dari presiden pertama. Soeharto dan para pendukungnya akhirnya menanamkan pemerintah baru ini sebagai "Orde Baru". Menjelang tahun 1967 mereka telah melancarkan reorientasi kebijakan-kebijakan ekonomi, politik dan hubungan luar negeri.[68]

Keikutsertaan para aktivis radikal NU dalam demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di tahun 1966, menjadikan NU punya peran penting dalam pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional oleh Jenderal Soeharto. Pada bulan Maret, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang berisi memberikan keleluasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan memulihkan keamanan dan ketertiban. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Jenderal Soeharto, didampingi Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik dan Idham Chalid. Dengan demikian, telah terjadi dualisme kepemimpinan nasional, dengan posisi Soekarno yang masih sah sebagai Presiden, namun disisi lain ada sebuah Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.[69]

C. NU Pada Masa Orde Baru

Peranan penting NU bagi lahirnya Orde Baru tidak dengan sendirinya menjamin posisi NU dalam tatanan pemerinatahan yang baru. Pada tanggal 25 Juli 1966, Presiden Soeharto membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Ampera. Idham Chalid diangkat menjadi Menteri Utama Bidang

[68] Chumairoh, *NU Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila),* (Skripsi UIN Sunan Ampel Fakultas Adab Dan Humaniora, Surabaya. 2014), 4.
[69] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan Rakyat, dan orang NU lainnya mendapatkan jabatan sebagai Menteri Agama. Keuntungan politik yang tipis dalam pemerintahan yang baru ini tidak membuat kaum tradisionalis jera dalam panggung politik.

Pada awal Februari 1967, juru bicara NU di DPR-GR, Nuddin Lubis mengusulkan kepada kelompoknya sebuah resolusi untuk mencopot jabatan Soekarno sebagai presiden. Kiai Masykur mempertanyakan siapa yang akan menggantikan Soekarno seandainya harus diturunkan dari jabatannya, dan bagaimana jika penggantinya bukanlah orang Jawa. Pada tahun 1967, calon yang dipertimbangkan untuk kursi kepresidenan adalah Jenderal Nasution, orang Sumatera dan Ketua MPRS. Sebagian generasi muda NU memang dekat dengan Nasution. Namun, sebagian mereka juga mempunyai keberatan, karena Nasutionlah yang menandatangani perintah pembubaran Liga Demokrasi yang menentang Demokrasi Terpimpin, dan memenjarakan Sekjen Imron Rosyadi.[70]

Resolusi Lubis berhasil berkat dukungan Kiai Bisri, Wakil Rais Am dan dorongan Ketua DPR-GR, Ahmad Sjaichu dalam sidang paripurna tanggal 9 Februari 1967. Resolusi tersebut tidak mendapatkan pengesahan dari Ketua Umum PBNU, Kiai Idham Chalid yang waktu itu dihadapkan pada *fait accompli.* Kemudian Lubis meminta pengesahan dari Mohammad Dahlan selaku wakil Ketua NU. Kiai Wahab merestui inisiatif Lubis, sementara Idham Chalid tunduk terhadap keputusan ini.[71]

---

[70]Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 101.
[71] *Ibid*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 23 Februari 1967, resolusi kedua yang diajukan oleh Djamaluddin Malik, yang juga anggota DPR-GR dari NU mengenai permintaan agar MPRS mengangkat Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, juga disahkan. Demikianlah, pada tanggal 8–11 Maret 1967, MPRS mencopot semua kekuasaan Soekarno dalam pemerintahan serta melarangnya melakukan kegiatan politik hingga pemilu mendatang. Berakhirnya kepemimpinan dualisme ini juga mengakhiri kegelisahan NU dalam memihak Soekarno dan Soeharto. Kiai Masykur mengatakan bahwa resolusi Lubis dan Malik telah membuka halaman baru yang ditandai oleh hilangnya konflik dan dimulainya pembangunan Negara dalam segala bidang. NU tampak kembali bersatu dalam mendukung Soeharto. Idham Chalid dengan kelompok konservatifnya yang semula pro-Soekarno dan pro-Demokrasi Terpimpin, perlahan bisa menyesuaikan diri dengan rezim baru.[72]

Pada pemerintahan Orde Baru, Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila yang dikenal sebagai sistem demokrasi berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai kesejahteraan sosial. Untuk menerapkan Demokrasi Pancasila secara total, Soeharto mengambil kebijakan untuk memfokuskan pada pemurnian Pancasila dan meletakkannya sebagai pilar ideologis rezim. Orde Baru mengklaim dirinya sebagai tatanan pemerintahan yang tampil sebagai kekuatan pengoreksi total terhadap rezim

[72] *Ibid*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orde Lama dan hendak melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.[73]

Pada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 mengenai susunan fraksi di semua DPRD. Fraksi NU dalam parlemen melalui juru bicaranya Imam Sofwan, menentang keras kebijakan tersebut. Menurut NU, tujuan Peraturan Menteri tersebut hanya untuk memaksakan masuknya anggota-anggota baru DPRD dari kalangan sipil dan purnawirawan ABRI, yang nantinya akan merubah keseimbangan kekuatan di semua DPRD, dimana Golkar akan menjadi mayoritas tunggal. Menjelang Pemilu 1971, Rois Am KH. Wahab Hasbullah pada Muktamar NU ke-25, Desember tahun 1971 telah memberikan isyarat bahwa tak ada gunanya NU menjadi partai politik, karena partai NU atau partai manapun tidak akan mungkin memenangkannya.[74] Keharusan bagi para pegawai negeri untuk memilih Golkar (monoloyalitas) hanya sedikit mempengaruhi kaum tradisionalis. Sebab, Menteri Agama menolak melaksanakannya di Departemen Agama. Sebagai akibatnya, kaum tradisioanlis kehilangan jabatan Menteri Agama setelah pemilu.[75] Namun, Kiai Wahab tetap menasehatkan agar NU tidak sampai menarik diri dari DPRD hasil pemilu 1971, demi untuk menghindarkan madharat yang mungkin akan lebih menyengsarakan.

---

[73] Chumairoh, *NU Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila),* (Skripsi UIN Sunan Ampel Fakultas Adab Dan Humaniora, Surabaya. 2014), 9.
[74] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 371.
[75] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu petunjuk harian PBNU ditandatangani Idham Chalid sebelum Pemilu, berbunyi: “tingkatkanlah partisipasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketentraman dan umumnya dalam mengantarkan semua bidang pembangunan.” Idham Chalid menghimbau agar rakyat setia kepada Presiden Soeharto dan Negara. Ketika terjadi polemik tentang jihad, Idham Chalid berpihak kepada Presiden Soeharto.[76]

Hasil Pemilu 1971, membuat NU sangat kecewa karena menempati urutan kedua setelah Golkar dan mengeluhkan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Kemenangan Golkar dengan tata caranya membawa partai tradisionalis memainkan peran yang selalu dihindarinya, yaitu menjadi oposan terhadap pemerintah. Munculnya aliran radikal dalam NU sebagai bentuk kemarahan dalam pengambilan sikap di DPR. Kelompok konservatif di NU yang bersikap moderat terhadap pemerintahan Soeharto, mendapatkan imbalan. Setelah pemilu, Idham Chalid dilantik menjadi Ketua DPR dan MPR. Tetapi, NU kehilangan Departemen Agama yang sejak Kemerdekaan hampir selalu dipercayakan kepadanya dan sejak tahun 1963 menjadi Departemen terbesar di Indonesia. Pengambilan keputusan pemerintah tersebut bukanlah karena pengelolaan departemen yang kurang baik, tetapi untuk menghapus kekuasan NU yang menyerupai kekuasaan Negara dalam Negara.[77]

---

[76] *Ibid*, 157-159.
[77] *Ibid*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak pemilu 1971 ternyata tidak hanya berhenti sampai disitu, perpecahan juga terjadi dalam tubuh NU antara kelompok tradisionalis radikal dengan kelompok konservatif yang moderat. Kelompok tradisionalis radikal yang dipimpin oleh Subchan sejak tahun 1966, posisinya di NU dipermasalahkan karena sikap politik dan gaya hidupnya yang kurang santri. Dalam setiap tindakannya selalu mengundang kemarahan para Kiai karena sikapnya yang radikal dan bicaranya terlalu blak-blakan. Namun ia banyak mendapat dukungan dari para aktivis melalui surat-surat yang cukup banyak jumlahnya. Sedangkan kelompok konservatif yang dipelopori oleh KH. Idham Chalid banyak mendapatkan dukungan dari para ulama dan Kiai. Kelompok radikal NU semakin besar dan Subchan ingin merebut posisi pimpinan gerakan kaum ulama tersebut.[78]

Antara Subchan atau Idham Chalid, merupakan saat yang menentukan bagi NU untuk memilih jalan konfrontasi atau konsiliasi dengan pemerintah. Sejak Muktamar NU tahun 1967 sampai 1971, Subchan tetap kalah dalam pemilihan Ketua Umum PBNU dengann Idham Chalid.[79] Meskipun Subchan sempat menang mengungguli Idham Chalid dan menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar 1971, tetapi atas kemenangan tersebut dibatalkan oleh Rais Am Kiai Bisri Syansuri dengan menyatakan tidak bisa bekerjasama dengan Subhan. Hal ini bukan karena persaingannya dengan Idham Chalid, melainkan penilaian ulama tentang pergaulan Subchan yang menyimpang dari nilai-nilai

[78] *Ibid*, 163.
[79] *Ibid*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahlussunnah wal Jamaah.[80] Idham Chalid berhasil menarik simpati pemerintah sehingga ia diangkat menjadi Ketua DPR/MPR atas rekomendasi Ali Murtopo, Asisten Pribadi Presiden dan atas restu Kiai Wahab Hasbullah. Meskipun Kiai Bisri secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya, dalam muktamar tersebut tetap menyediakan tempat bagi Subchan sebagai Wakil Ketua I. Situasi mendua ini terpecahkan setelah wafatnya Rais Am Kiai Wahab Hasbullah, yang kemudian digantikan oleh Kiai Bisri. Pada tanggal 21 Januari 1972, dengan wasiat Kiai Wahab, Syuriah memutuskan untuk membebaskan Subchan dari partai melalui surat yang ditandatangani oleh Kiai Bisri, Idham Chalid dan Kiai Dachlan.[81]

1. Fusi Partai

Setelah kehilangan Departemen Agama pada tahun 1973, NU kembali dikejutkan oleh kebijakan pemerintah atas penggabungan paksa partai-partai politik menjadi dua partai, yaitu penggabungan empat partai Islam (NU, Parmusi, Syarikat Islam dan Perti) ke dalam PPP, sementara lima partai nasionalis dan katolik (PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba) ke dalam PDI. Pada tanggal 5 Januari 1973, PPP secara resmi dideklarasikan dengan naskah deklarasi yang ditandatangani oleh 5 orang, yaitu Dr. KH. Idham Chalid, HMS Mintaredja SH, H. Anwar Tjokroaminoto, KH. Rusli Halil, dan KH. Masykur. Keterlibatan NU dalam PPP sejak awal diwarnai oleh kekecewaan. Dalam pembagian kursi DPR, NU hanya diberi jatah 44% yang masih dibawahnya Parmusi. Kiai

[80] Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*, 191.
[81] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisri diangkat menjadi Rais Am Majelis Syuro, Idham Chalid diangkat menjadi Presiden Partai, tetapi jabatan-jabatan eksekutif berada ditangan ketua umumnya Mintaredja, seorang modernis dari Muslimin Indonesia (MI).[82] Setelah kedua partai terbentuk, pada tahun 1974 pemerintah mengajukan RUU tentang partai Politik dan Golongan Karya yang isinya hanyalah melegitimasi tiga kekuatan politik, yaitu PPP, PDI dan Golkar.

Undang-Undang yang disahkan tahun 1975, menegaskan lahirnya sebuah partai Islam tunggal. NU tidak menyadari secara langsung dampak negatif fusi ini. Setelah hilangnya Departemen Agama, fusi partai-partai ini membuat golongan tradisionalis kehilangan sebagian sumber pengaruhnya dalam pemerintahan. Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975 menjadi pukulan terakhir bagi para ulama yang sudah tahu bahwa MUI akan semakin menghilangkan pengaruh mereka dalam pemerintahan.[83]

2. Program P-4

Setelah melakukan penyederhanaan partai, Soeharto memandang bahwa penyelewengan-penyelewengan UUD 1945 dan Pancasila yang banyak terjadi pada masa Orde Lama bersumber pada kenyataan tidak diamalkannya Pancasila secara sungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melihat kenyataan ini, timbul keinginan pemerintah Orde Baru untuk menjabarkan Pancasila

[82]Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid*, 375.
[83] Andree Feillard, *NU Vis-ā-vis Negara*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk rumusan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Rumusan ini kemudian disahkan MPR melalui ketetapan MPR No.11/1978, dengan tujuan sebagai penjabaran sila-sila Pancasila agar menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dan dapat diamalkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.[84]

Sebuah komisi yang dinamakan P7 (Penasehat Presiden Mengenai P-4) dibentuk di Jakarta dan diketuai oleh Dr. Roeslan Abdul Ghani, mantan ketua PNI periode Orde Lama. BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P-4) juga didirikan di Jakarta untuk mengkoordinir pelaksanaan program P-4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Idham Chalid diangkat menjadi salah satu anggotanya.[85]

3. Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila

Setelah berhasil menjalankan kebijakan P-4, pemerintah Orde Baru membuat kebijakan baru menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik dan Golkar, serta sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan.[86] Gagasan pemerintah tentang penyatuan asas tunggal Pancasila pertama kali diajukan Soeharto dalam pidato kenegaraan didepan sidang DPR 16 Agustus 1982 dan dimasukkan dalam ketetapan MPR No. II/1983 (Pasal 3 bab IV).[87] Pada tanggal 17

---

[84] Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam : Pergumulan Kultur Dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 50-51.
[85] Faisal Ismail, *Ideologi, Hegemoni Dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam Dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 147.
[86] Chumairoh, *NU Pada Masa Orde Baru*, 15.
[87] Faisal Ismail, *Ideologi, Hegemoni*, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juni 1985, atas persetujuan DPR, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8/1985 menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau masyarakat harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal.

Menanggapi kebijakan tersebut, dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1983, masalah tersebut cukup seru diperdebatkan. Sehingga membawakan hasil akhir bahwa Pancasila diterima sebagai asas tunggal organisasi dengan rumusan yang kompromistis, dan tidak mengesampingkan Islam. Alasan penerimaan tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu *pertama,* nilai-nilai Pancasila dianggap baik (*maslahah*), dan NU menerima hal tersebut untuk mewujudkan nilai-nilai islam dalam bentuk motivasi agama, bukan politik. *Kedua,* alasan Pancasila diterima karena fungsinya sebagai *mu'ahadah* atau *misaq*, kesepakatan antara umat islam dengan golongan lain di Indonesia untuk mendirikan Negara.[88] Dalam pandangan fiqih, asas Pancasila adalah salah satu dari sekian banyak persyaratan bagi keabsahan Negara RI. Dan itu bukanlah persyaratan keagamaan. Sehingga NU tidak mempunyai cukup alasan untuk menolak, selama Pancasila tidak berfungsi menggantikan kedudukan agama dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan.[89] Kiai Ahmad Siddiq mengeluarkan fatwa politik bahwa penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila adalah wajib secara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila merupakan bentuk final

[88] Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam di Indonesia,* 344.
[89] Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*, 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sasaran politik umat Islam, dan bukan sasaran antara atau sementara.[90]

D. Hubungan Dan Peran NU Terhadap Negara

Berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh para ulama dan bergerak dalam bidang sosial keagamaan, tidak dapat dipungkiri bahwa peranannya sangat besar terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Keterlibatan NU dalam pemerintahan sudah terlihat sejak masa kolonial Belanda hingga Jepang. Setelah perang kemerdekaan, NU punya andil besar dalam perumusan dasar Negara Indonesia, Pancasila yang sangat menentukan bentuk Negara Indonesia.

Sejak pemilu 1955, NU memainkan peran besar dalam perpolitikan Indonesia. Tokoh NU yang memainkan peran politik hingga masa Orde Baru adalah KH. Idham Chalid. Jabatan-jabatan politik maupun organisasi yang diraihnya, tidak pernah lepas dari citra dirinya sebagai ulama besar NU yang menjabat Ketua Umum PBNU selama 28 tahun. Ketika Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpinnya, di tengah dilema kedekatan NU dengan Soekarno dan kedekatan Soekarno dengan PKI, NU yang diketuai oleh Idham Chalid menerima Demokrasi Terpimpin dengan pertimbangan untuk lebih mementingkan kemaslahatan umat. NU tetap mendukung kebijakan Soekarno, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan agama dan tidak membawa kemadharatan bagi rakyat. Prinsip NU ini, sangat nyata

[90] Ismail, *Pijar-Pijar Islam*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkan dengan jabatannya sebagai Menteri Agama sejak kemerdekaan hingga Orde Baru, yang merupakan posisi sangat menentukan dalam landasan kegiatan keagamaan di Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, keikutsertaan NU dalam DPR-GR menimbulkan perdebatan diantara para ulama NU. Namun, Idham Chalid menegaskan bahwa PBNU memberikan kebijakan terhadap anggotanya untuk tetap duduk dalam Kabinet Karya dan Dewan Nasional. Hal ini didasarkan untuk mencegah datangnya madharat yang lebih besar. Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU memegang beberapa prinsip fikih, yaitu *Dar' al-mafasid muqaddimun 'ala jalb al-masalih*, menghindarkan terjadinya kerusakan terlebih dahulu daripada mencari kebaikan. Kemudian dalam menghadapi gagasan Nasakom Soekarno yang memantapkan kedudukan PKI, Idham Chalid yang juga memegang jabatan sebagai Kepala Biro Keamanan bekerja sama dengan ABRI, karena memiliki kekhawatiran yang sama terhadap PKI. Pada tahun 1963, Idham Chalid merupakan satu-satunya pemimpin partai politik yang membela organisasi-organisasi penentang PKI seperti PMII, Barisan Ansor Serba Guna, Lesbumi, HPMI, serta mengakui organisasi bentukan ABRI yang merupakan kumpulan karyawan bukan komunis, yaitu SOKSI. Dengan demikian, NU mempunyai peran besar bekerja sama dengan ABRI dalam penumpasan PKI.

Peristiwa penumpasan PKI yang dipelopori oleh Panglima Kostrad Jenderal Soeharto merupakan titik awal lahirnya Orde Baru. Keikutsertaan para aktivis radikal NU dalam demonstrasi-demonstrasi mahasiswa tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1966 dalam penurunan kekuasaan Soekarno dan pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional oleh Jenderal Soeharto, membuat para Jenderal menilai bahwa NU merupakan satu-satunya partai politik yang dapat dijadikan tumpuan harapan, disamping partai nasional lainnya yang terlarang karena kedekatannya dengan Soekarno, seperti Masyumi yang dilarang dan diawasi pemerintah pada tahun 1960. Tetapi, NU masih punya peran dalam golongan kaum militer pendukung Soeharto.

Menjelang Pemilu 1977, NU yang berfusi ke PPP juga mempunyai andil besar dalam perpolitikan pada masa Orde Baru, sebelum akhirnya terjadi kemelut yang sangat hebat dalam tubuh PPP antara unsur NU dan unsur MI menjelang pemilu 1982. Dalam kepengurusan PPP, Idham Chalid menjadi Presiden Partai, Kiai Bisri sbagai Rais Am Majelis Syuro, dan jabatan-jabatan eksekutif lainnya dipegang oleh kelompok MI sebagai ketua umumnya. Dalam menindaklanjuti pembentukan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P-4) yang juga didirikan di Jakarta untuk mengkoordinir pelaksanaan program P-4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional, dengan Idham Chalid yang ditunjuk sebagai ketua. Selanjutnya, dalam mengatasi kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada tahun 1982, dengan perdebatan sangat panjang, NU memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya maupun dasar Negara. Alasan penerimaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai-nilai Pancasila dianggap baik, dan NU menerima hal tersebut untuk mewujudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai islam dalam bentuk motivasi agama, bukan politik. selain itu, alasan Pancasila diterima karena fungsinya sebagai *mu'ahadah* atau *misaq*, kesepakatan antara umat islam dengan golongan lain di Indonesia untuk mendirikan Negara.[91]

NU yang selalu tampil dengan jalan tengah, membuatnya tetap eksis dalam keikutsertaannya membangun Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Sejak berlakunya Demokrasi Terpimpin Soekarno, meskipun NU terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung Soekarno yang dipelopori oleh Kiai Wahab dan Idham Chalid, dan kelompok penentang Soekarno yang dipelopori oleh Kiai Bisri, tidak membuat perbedaan pendapat tersebut membawa perpecahan dalam tubuh NU. Bahkan Idham Chalid selaku Ketua Umum PBNU selalu mendapatkan posisi aman dalam pemerinatahan Soekarno. Menjelang Orde Baru, NU terbagi menjadi dua golongan, yaitu kelompok konservatif pendukung Soekarno yang dipelopori oleh KH. Idham Chalid dan para Kiai senior, dan kelompok radikal yang dipelopori oleh Subhan. Ketika Pemerintahan Orde Baru resmi dideklarasikan pada tahun 1969, para kelompok konservatif dan ulama yang sebelumnya masih mendukung Soekarno, perlahan dapat menyesuaikan diri dengan pemerintahan Soeharto. Sebaliknya, Subchan yang sebelumnya sangat mendukung Soeharto, ia tidak dapat mempertahankan posisinya dalam pemerintahan maupun dalam kepengurusan NU karena sikapnya yang radikal. Dalam pemilu 1971, NU tetap mendapatkan kepercayaan dalam

[91] Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam di Indonesia*, 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, yaitu diangkatnya Idham Chalid sebagai Ketua DPR dan MPR, meskipun tanpa koalisi. Setidaknya hal itu sudah cukup untuk mewakili NU, sebab jabatan Ketua Umum PBNU masih melekat dalam diri KH. Idham Chalid.

Dengan tetap berprinsip pada tradisi Sunni, NU dibawah kepemimpinan Idham Chalid mampu memainkan perannya sebagai organisasi Islam yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Lama maupun Orde Baru tanpa menghilangkan kekuatannya dalam pemerintahan. Dalam peralihan sistem pemerintahan ke Orde Baru, ia tetap mendapatkan posisi aman dalam pemerintahan. Hal ini juga disebabkan karena para ulama NU yang dengan cepat bisa menyesuaikan dirinya dalam menghadapi kebijakan-kebijakan baru Soeharto. NU mempunyai kewajiban bahwa kemaslahatan rakyat Indonesia lebih penting dari pada hanya mempersoalkan kepemimpinan Soekarno yang sudah berlalu. Kiai Idham Chalid yang tampil sebagai politisi, semakin memperkuat hubungan NU dengan pemerintahan pada masa Orde Lama, khususnya masa Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

NU DAN POLITIK KEBANGSAAN PADA MASA DR. KH. IDHAM CHALID

A. Kemelut Dalam Tubuh NU

Pada tahun 1973, awal bersatunya empat partai Islam dalam PPP, ketenangan berjalan sampai Pemilu ketiga tahun 1977. Hubungan NU dan PPP mulai retak pada peristiwa menjelang Pemilu 1982, dimana daftar anggota calon DPR yang disusun oleh unsur Parmusi dan disetorkan kepada Ketua LPU 1982, terjadi tanpa sepengetahuan unsur NU. Peristiwa ini benar-benar sudah menyimpang dari prinsip PPP. Selain itu mengenai datangnya dua tokoh puncak DPP-PPP, Dr. J. Naro dan KH. Masykur ke hadapan Presiden Soeharto untuk menanyakan dan mengungkapkan keinginannya tentang kedudukan Parpol dan Golkar dalam KPPS sebagai Wakil Ketua, tanpa musyawarah dan persetujuan mandat atas nama DPP-PPP. Karena peristiwa tersebut, DPR yang memutuskan RUU Pemilu akan dilaksanakan secara voting, PPP (mayoritas kelompok NU) mengambil sikap untuk tidak menghadiri sidang DPR untuk mengesahkan RUU-Pemilu menjadi Undang-Undang. Dalam rapat PBNU tanggal 27 Februari 1980, seluruh pimpinan PBNU membenarkan sikap NU tersebut berhubungan dengan persoalan keanggotaan dalam KPPS.[1]

[1] Abdul Basit Adnan, *Kemelut Di NU*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keretakan dalam PPP, dipelopori oleh unsur NU dan Parmusi yang saling berbeda pendapat. Menjelang Pemilu 1982, dengan daftar calon anggota DPR yang disetorkan oleh unsur Parmusi yang mengubah susunan unsur NU yang sebelumnya mayoritas menjadi minoritas, menyebabkan NU mempunyai pandangan akan keluar dari PPP. Namun, dengan pertimbangan rapat PB Syuriah dan saran Rois Am KH. Ali Makhsum, NU tidak jadi mengundurkan diri dari PPP. Tetapi NU akan mengambil sikap ketika kedudukannya dalam PPP tidak sesuai dengan asas musyawarah, solidaritas intern, dan prinsip-prinsip organisasi lainnya yang tidak ditegakkan.

DPP-PPP tanpa unsur Parmusi mengajukan surat kepada Ketua LPU untuk meninjau kembali nama-nama daftar calon yang disodorkan oleh J. Naro. Surat tersebut ditandatangani oleh KH. Idham Chalid, KH. Masykur, Nuddin Lubis dan Yahya Ubaid. Namun surat tersebut tidak pernah mendapat respon oleh LPU. Kekecewaan terhadap Presiden PPP sekaligus Ketua Umum PBNU, KH. Idham Chalid menjadi semakin bertambah. Idham Chalid dituduh kurang gigih, bahkan dianggap tidak berbuat banyak untuk membela unsur NU. Idham juga dianggap terlalu bersikap mengalah pada Parmusi dalam penyusunan daftar calon tersebut.[2] Idham Chalid pun berada dalam posisi yang serba sulit. Apabila ia menuruti suara Musyawarah Syuriah PBNU, akan mengakibatkan dirinya tidak disenangi oleh pihak J. Naro dan yang berdiri dibelakangnya. Namun, jika tidak memperjuangkan, maka ia

[2] Tempo, *Idham Chalid Bertahan Atau Mundur?* (No. 27 Thn. XII, 4 September 1982), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengecewakan warga NU yang telah memilihnya duduk sebagai Ketua Umum PBNU dan Presiden PPP.[3]

Dalam menghadapi peristiwa ini, ada beberapa kemungkinan yang bisa dipilih oleh NU. *Pertama*, Ketua Umum NU, KH. Idham Chalid dan Rois Tsani PBNU, KH. Masykur mengundurkan diri dari jabatan DPP-PPP. *Kedua*, anggota PBNU diminta untuk menarik diri dari pencalonan, dan jika ada yang memilih duduk di DPR maka akan dikeluarkan dari kepengurusan PBNU, atau sikap keras dapat diambil dengan NU keluar dari PPP.[4]

Penampilan Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU semakin disorot, dan daftar keluhan tentang dirinya semakin menebal. Idham tidak pernah muncul di kantor PBNU, sehingga surat-surat yang perlu tanda tangannya harus dibawa ke rumahnya. Menurut penjelasan Sekjen PBNU, H. M. Moenasir, Program dasar 5 Tahun Pengembangan NU hasil keputusan Muktamar Semarang sama sekali belum dilaksanakan Idham Chalid. Idham Chalid juga tidak pernah secara rutin menyelenggarakan rapat membahas perkembangan NU. Kekecewaan tersebut mendorong para ulama seperti, KH. Ali Makshum, KH. As'ad, KH. Syamsul Arifi, KH. Machrus Ali, dan KH. Achmad Siddiq mengadakan pertemuan pada tanggal 1 Mei 1982 di rumah H. A. Mudjib untuk mengemukakan keluhan terhadap kepemimpinan Idham Chalid. Dengan sikapnya yang kurang perhatian sebagai pengemban amanat Muktamar, Idham Chalid dianggap sudah tidak mungkin lagi melaksanakan

[3] Abdul Basit Adnan, *Kemelut Di NU*, 78.
[4] *Ibid*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugasnya sebagai Ketua Umum PBNU. Jika hal ini dibiarkan, maka akan merugikan jam'iyyah NU.[5]

Pada tanggal 2 Mei 1982, dengan kedatangan Kiai As'ad, Kiai Ali Makshum, Kiai Masykur dan Kiai Machrus Ali ke rumah Idham Chalid, ia menyatakan tidak dapat menyelesaikan masalah karena sakit. Idham Chalid juga mengatakan bahwa kedatangan para Kiai ke rumahnya merupakan suatu moment yang tepat, karena Idham Chalid sebetulnya sudah lama ingin menyerahkan jabatan Ketua Umum PBNU lantaran lelah, tidak kuat lagi, dan dan kondisi penyakitnya. Menurut keterangan Kiai Masykur, Idham Chalid beberapa kali menyebut ikhlas dalam penyerahan jabatannya. Sehingga ada Kiai yang sampai menangis mendengar pernyataan Idham Chalid. Kemudian Idham Chalid menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum PBNU pada tanggal 2 Mei 1982 dengan disaksikan oleh para Kiai dan ulama.[6]

Mendengar berita tersebut, semua media pers baik tokoh maupun warga NU merasa kaget. Anggota DPR dan Ketua Umum Pemuda Ansor, Chalid Mawardi, menilai pengunduran diri Idham Chalid merupakan klimaks usaha untuk mendongkel Idham Chalid dari kedudukan strategisnya. Anggota DPR lainnya seperti Amin Iskandar yang dekat dengan wartawan secara gencar memprotes proses pengunduran diri Idham Chalid yang dinilai tidak

[5] Tempo, *Idham Chalid Bertahan Atau Mundur?*, 12.
[6] *Ibid*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar. Bahkan Amin Iskandar secara berani menuduh para Kiai melakukan kudeta terhadap Idham Chalid.[7]

Perang pernyataan tentang respon pengunduran diri Idham Chalid yang belum reda, muncul kejutan lain pada tanggal 14 Mei 1982, Idham Chalid mengeluarkan pernyataan pencabutan pengunduran dirinya. Alasan tersebut sangat sederhana, yaitu adanya protes 17 wilayah NU yang tidak bisa menerima begitu saja pengunduran diri Idham Chalid. Sehari sebelum pencabutan pengunduran dirinya, Idham Chalid menyatakan kepada KH. Siafuddin Zuhri bahwa dirinya tidak merasa dipaksa oleh KH. Ali Makhsum dan kawan-kawannya untuk mengundurkan diri. Sebab, mereka adalah kawan-kawan dan guru-gurunya. Dalam surat pernyataan pencabutan pengunduran dirinya, ia menutup dengan meminta maaf kepada para Kiai yang telah menjadi saksi pernyataan yang telah ia cabut.[8]

Choirul Anam menilai bahwa sikap Idham Chalid dalam pencabutan pengunduran dirinya kembali merupakan kasus otonomi yang mengembang melampaui kewibawaan ulama dan membahayakan paham keulamaan yang selama ini di anut oleh NU. Karena itu, Kiai As'ad berusaha mengembalikan posisi Idham ke tempat asalnya, yakni dibawah pengawasan Pimpinan Syuriah.[9] Pengunduran diri Idham dan pencabutan kembalinya ternyata benar-benar mengakibatkan kemelut yang paling parah dalam sejarah NU. Pernyataan mengenai sah atau tidaknya pengunduran Idham Chalid muncul

[7] Abdul Basit Adnan, *Kemelut Di NU*, 91.
[8] *Ibid*, 92.
[9] Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari berbagai kalangan yang pro dan kontra terhadap Idham Chalid. Rapat harian PB Syuriah yang diselenggarakan di rumah Idham Chalid pada tanggal 16 Mei juga tidak memecahkan masalah ini. Pada tanggal 14 Agustus, muncul suatu seruan PBNU mengenai tanda tangan Rais Aam KH. Ali Makshum sebagai pemangku jabatan Ketua Umum. Dari luar, NU tampak terbagi menjadi dua kubu, yaitu kelompok pendukung Idham yang terdiri dari politisi dan kelompok ulama. Mengenai pernyataan KH. Ali Makshum sebagai pemangku jabatan Ketua Umum, dari kubu Idham Chalid, Amin Iskandar mengungkapkan rencana diadakannya Muktamar Luar Biasa yang akan memecahkan masalah tersebut, dan ia yakin bahwa Idham Chalid akan terpilih kembali karena lebih dari separuh wilayah dan cabang mendukungnya.[10]

Para ulama di pimpinan Syuriah tidak menghendaki adanya Muktamar Luar Biasa hanya untuk menyelesaikan masalah Idham Chalid, karena pada saat itu NU belum sepenuhnya melepaskan diri dari politik dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Idham Chalid pun juga mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan musyawarah saja. Mereka khawatir, adanya muktamar menjelang Sidang Umum MPR akan lebih menjerumuskan NU dalam politik, misalnya dimunculkannya calon pimpinan yang bukan berkepribadian NU. Tetapi pihak ulama tetap ingin mempertahankan *status quo* dengan Ali Makshum sebagai pemangku jabatan Ketua Umum, terutama pada saat gawat seperti Sidang Umum MPR untuk

[10] Tempo, *Idham Chalid Bertahan Atau Mundur?*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan integritas NU.[11] Dukungan terhadap Idham Chalid nampaknya juga datang dari pihak pemerintah yang menginginkan Idham Chalid tetap menjadi pemimpin, setidaknya sampai Sidang Umum MPR agar stabilitas dan pembangunan tidak terganggu. Idham Chalid diharapkan juga bisa mencegah munculnya orang-orang ekstrim dalam NU.[12]

Muktamar tetap tidak terselengarakan atas ketidaksetujuan Syuriah selaku pimpinan tertinggi NU. Idham Chalid hanya mengatakan bahwa jika ada tenggang waktu untuk bertemu dan berbicara, mungkin semua masalah bisa terselesaikan, dan lebih baik penyelesaian diserahkan kepada rakyat. Namun, pada peringatan 10 tahun wafatnya KH. Wahab Hasbullah di Pesantren Tambakberas Jombang, pertemuan antara KH. Idham Chalid, KH. Ali Makshum dan para tokoh Syuriah lainnya ternyata sama sekali tidak menyinggung permasalahan yang tengah menjadi kemelut panjang dalam NU. Perbincangan mereka dalam pertemuan tersebut hanyalah mengenai pemurnian Pancasila.[13]

Dalam terbitan Tempo tanggal 21 Agustus 1982, Kiai Ali Makshum menjelaskan bahwa pengunduran diri Idham Chalid yang ditandatangani di hadapan para Kiai NU adalah sah lepasnya jabatan Ketua Umum PBNU dari dirinya. Dengan pernyataan Idham Chalid yang dengan ikhlas menyerahkan jabatannya, maka Rais Am mulai menentukan pejabat baru sebagai penggantinya dengan musyawarah bersama para ulama. Menghadapi

[11] *Ibid*, 15.
[12] *Ibid*, 15.
[13] *Ibid*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa pencabutan dirinya kembali, menurut hukum, itu tidak pernah dianggap sah, dan para ulama menanggapinya dengan sepi. Maka dari itu, Ali Makshum sebagai Rais Am yang menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PBNU. "Jika Idham tetap menganggap dirinya Ketua Umum, maka itu terserah dirinya. Dan ulama tetap menganggap Idham Chalid sudah mundur", ungkap Kiai Makshum.[14] Sehingga apapun yang dilakukan Idham Chalid untuk membangun kembali otonomi dirinya, hanyalah merupakan penegasan bagi pembuatan jurang pemisah antara sekelompok orang Tanfidziyah dan para ulama NU.

Pada saat itu, NU terbelah menjadi dua kubu, yang kemudian dikenal sebagai kelompok Cipete pendukung Idham Chalid di Jakarta dan kelompok Situbondo dari kalangan pesantren Jawa Timur Kiai As'ad. Kelompok Situbondo tidak lagi mengakui Idham Chalid sebagai Ketua Umum, tetapi menahan diri dari menunjuk penggantinya sampai Muktamar 1984.[15] Pada paruh kedua tahun 1983, pemerintah lebih jelas terlihat menyukai kelompok Situbondo dari pada kelompok Cipete yang pada waktu itu keduanya bermaksud untuk menyelenggarakan Munas dan kemudian Muktamar. Pemerintah memiliki tujuan untuk mendekati organisasi-organisasi besar agar mau menerima tuntutan asas tunggal Pancasila. Kiai As'ad dan sekutunya dinilai mempunyai pengaruh membuat seluruh organisasi untuk menuruti tuntutan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan

[14] Abdul Basit Adnan, *Kemelut Di NU*, 105.
[15] Martin Van Bruinessen, *NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta : LKiS, 1999), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh kepada Munas yang akan diselengarakan di Pesantren Kiai As'ad di Situbondo pada bulan Desember.[16] Para ulama Syuriah menunjuk Abdurrahman Wahid sebagai ketua panitia Munas 1983.[17] Dalam Munas Situbondo tersebut, Idham Chalid tidak hadir. Setelah ada sinyal yang jelas dari pemerintahan, kelompok Cipete melepaskan rencananya untuk menyelenggarakan Munas dan Muktamar sendiri.[18] Diantara keputusan Munas tersebut adalah mengembalikan NU ke posisi awal, yaitu NU kembali ke Khittah 1926, yang salah satu aspeknya adalah mengembalikan kewibawaan, peran, fungsi dan otoritas ulama.[19]

B. Perilaku Politik NU

Dalam berpolitik, NU lebih cenderung mempraktikkan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Politik kebangsaan NU sudah ada sejak NU berjuang melawan penjajahan Belanda. Politik kebangsaan adalah politik yang orientasinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Islam adalah pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk mengatur urusan dunia dan akhirat. Dengan prinsip inilah, NU dalam berpolitik selalu menempatkan agama Islam sebagai sumber nilai dan kearifan, bukan sebagai alat untuk meraih kepentingan politik praktis.

---

[16] Martin Van Bruinessen, *NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, 127.
[17] Mitsuo Nakamura, *Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 80-an : Dari Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984*, dalam Greg Barton Dan Greg Fealy (ed), *Tradisionalisme Radikal : Persinggungan NU-Negara* (Yogyakarta : LKiS, 1997), 80.
[18] Martin Van Bruinessen, *NU : Tradisi*, 127.
[19] Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU yang semula menjadi wadah saluran politik yang tergabung dalam Masyumi menyatakan keluar secara resmi pada tahun 1952. Dari sinilah awal kiprah NU dilaksanakan dengan membentuk partai sendiri. Periode antara tahun 1952-1955, merupakan masa perluasan dan konsolidasi bagi partai NU. Pada pemilu 1955, NU mampu menduduki peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Hal ini merupakan prestasi luar biasa dengan usia partai NU yang sangat dini.

Prinsip-prinsip yang dianut NU membawa beberapa konsekuensi terhadap pendekatan politiknya. *Pertama*, dalam banyak situasi, NU lebih menekankan perlunya sikap berhati-hati, luwes dan memilih jalan tengah. Karena pendekatan ini tidak begitu membahayakan dibandingkan dengan sikap memusuhi dan konfrontasi. *Kedua*, membentuk pandangan yang realistis dengan menempatkan kekuasaan sebagai penentu utama dalam memilih strategi. Sebelum mengambil keputusan penting, para ulama harus terlebih dahulu memperhitungkan kekuatan umatnya dihadapan kekuatan pemerintah atau kekuatan lain di masyarakat. Melakukan perlawanan terhadap kekuatan yang lebih besar hanya akan memperbesar resiko kerugian bagi Islam. *Ketiga*, memberikan dorongan yang kuat kepada NU untuk menggunakan pendekatan partisipasionis terhadap pemerintah. Bila ingin menggunakan politik untuk mencapai tujuan, maka NU juga harus ikut memiliki andil kekuasaan dalam pemerintahan.[20]

[20] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan serba fikih juga seringkali menampilkan watak NU lebih akomodatif dan fleksibel, sehingga NU seringkali dituduh oportunistik atau memenuhi selera penguasa. Tuduhan tersebut kurang tepat, karena pada dasarnya apa yang dilakukan NU merupakan implementasi sistem nilai atau prinsip-prinsip ajaran yang berlaku di lingkungan NU. Bagi NU, pedomannya bukanlah "strategi perjuangan politik" atau "ideologi Islam" dalam artian yang abstrak, melainkan keabsahan di mata hukum fikih. Selama sistem nilai atau prinsip-prinsip ajaran NU tidak memberikan alternatif lain, penampilan NU akan tetap luwes, fleksibel dan akomodatif. Tetapi, apabila keseluruhan prinsip ajaran atau sistem nilai itu telah terganggu, maka NU bisa menjadi keras tanpa mau kompromi. Sikap ini pernah ditunjukkan NU ketika PKI mencoba hendak mengubah dasar Negara Pancasila pada tahun 1965. NU-lah satu-satunya partai politik yang mendesak pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Selain itu pada saat menghadapi RUU perkawinan tahun 1974 yang banyak membawa segi negatif bagi umat Islam, atas prakarsa Rais Am KH. Bisri Syansuri berhasil menolak dan melakukan perubahan-perubahan pada sebagian pasal-pasalnya.[21]

Kecenderungan NU bersikap akomodatif dapat dibuktikan dengan keterlibatannya dalam kabinet pertama Ali Sastroamidjojo I (1953-1956), penerimaannya atas Konsepsi Soekarno dan usulan-usulan mengenai Kabinet Karya pada tahun 1957. Kecenderungan tersebut juga terlihat ketika NU menyetujui kembali UUD 1945 melalui Dekrit, mendukung terbentuknya

[21] Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*, 185-186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPR-GR, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Soekarno dan bekerja sama dengan regim Orde Baru. Sikap militansi NU terlihat pada keluarnya NU dari Masyumi tahun 1952, desakannya agar Piagam Jakarta dicantumkan kembali dalam UUD 1959, perlawanan fisiknya terhadap aksi sepihak gerakan komunis pada tahun 1964-1965, serta keterlibatannya dalam menumpas PKI setelah percobaan kudeta terhadap Presiden Soekarno tahun 1965. Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan posisi UUD 1945 sebagai dasar Negara. Tetapi posisi Piagam Jakarta masih di anggap jiwa dan rangkaian tidak terpisahkan dengan UUD 1945. Akhirnya NU menerima dengan pernyataan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.[22]

Motivasi utama NU adalah materi dan status. Hal ini dilihat oleh sementara pihak dari sikap NU yang sering mengubah sikap politiknya demi menyelamatkan posisinya dalam pemerintahan. NU selalu dituduh oportunistik yang menyiratkan bahwa partai ini tidak mempunyai prinsip atau tidak pernah memegang prinsipnya.Sebagai contoh, NU telah menyatakan komitmennya kepada solidaritas Islam, namun partai ini justru berulang kali membangun aliansi dengan kubu nasionalis untuk melawan Masyumi. NU juga menyatakan mendukung Demokrasi Parlementer dan Piagam Jakarta, namun kemudian menerima Demokrasi Terpimpin. Tuduhan sebagai

[22] Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Islami dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959* (Bandung : Pustaka-Perpustakaan ITB, 1981), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oportunis semata tidak memadai untuk memberikan gambaran tentang motivasi dan langkah NU dalam berpolitik, kecuali karena bersumber dari konsistensinya dalam menerapkan prinsip yang mengutamakan kepentingan Islam dan penganutnya melebihi pertimbangan-pertimbangan apapun.[23]

Selain prinsip-prinsip utama NU, Idham Chalid secara pribadi adalah seorang politisi moderat yang cenderung memilih kerjasama dari pada konfrontasi. Mingguan Tempo juga menyebutkan bahwa dalam dunia politik, Idham Chalid adalah tokoh yang moderat, lunak dan lebih suka mengikuti arus tanpa hanyut ke dalamnya.[24] Kabinet jatuh bangun dan pemerintahan silih berganti, tetapi Idham Chalid hingga berusia kepala enam, tetap awet dan tetap mendapat jabatan. Deretan panjang jabatan yang pernah dipegangnya memang sangat mengesankan. Ia dituduh licin, bahkan oportunistis. Namun kepintarannya dalam bergaul membuatnya bersikap penuh toleransi dan mudah diterima berbagai pihak. Menghadapi berbagai penilaian orang terhadapnya, Idham Chalid tak banyak bicara. Ia hanya menanggapi dengan kalimat, "Saya hanya mengabdi pada bangsa dan tanah air sebagai amal kepada Allah semata. Sebagai seorang Muslim, saya selalu berdoa kepada Allah Swt agar pada akhirnya saya menjadi *khusnul khotimah*, orang yang mengakhiri hidupnya dalam limpahan serba kebaikan."[25]

Hubungannya dengan beberapa tokoh membangun kepribadiannya dalam menentukan arah masa depan NU yang dipegangnya selama 28 tahun.

---

[23] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, 361-370.
[24] Tempo, *Apa Dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982* (Jakarta : Grafiti Pers, 1981), 99.
[25] Tempo, *Idham Chalid Bertahan Atau Mundur ?*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idham Chalid dan Presiden Soekarno memiliki beberapa kesamaan yang mempengaruhi cara berpikir dan bertingkah laku Idham Chalid sendiri maupun NU. Idham Chalid maupun Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang mempribadi (*personalized*). Soekarno lebih suka mengatur taktik dan strategi politiknya sendiri. Ia mengandalkan kharisma dan kemampuan membaca situasi dengan cerdas. Kemampuannya "memanipulasi" dan bermain di antara partai-partai besar dan militer, akhirnya ia mampu mendapat dukungan partai-partai besar dan elite militer untuk mempraktikkan sistem Demokrasi Terpimpin.[26]

Sementara Idham Chalid, sejak ia diangkat menjadi Ketua Umum PBNU telah mengubah jalur administrasi kepengurusan dengan mengendalikan NU dari rumahnya. Ia bukan orang yang secara ketat mejalankan aturan-aturan organisasi layaknya KH. M. Dachlan (Ketua Tanfidziyah PBNU periode 1953-1956), melainkan suka memberi bantuan kepada siapapun yang datang, baik berupa materi, nasehat atau rekomendasi. Dengan sifat yang ringan tangan dan menggunakan kedudukannya untuk menolong siapa saja, dengan sendirinya ia membuat jaring-jaring patronase yang sangat berguna baginya karena banyak yang merasa berhutang padanya secara pribadi, bukan kepada NU. Kharismanya membuat orang yang berhubungan dengannya merasa nyaman, sehingga ia mendapatkan julukan ahli *yahannu*[27], istilah sehari-hari di kalangan pesantren yang berarti "mengatakan hal-hal yang menyenangkan orang, menyampaikan apa yang

[26] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid : Guru Politik Orang NU*, 52.
[27] Artinya berpura-pura ramah, baik dan penuh perhatian demi mencapai tujuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin mereka dengar". Gaya kepemimpinan inilah yang membuat ia bertahan lama di jajaran teratas Ketua Tanfidziyah PBNU.[28]

Baik Soekarno maupun Idham adalah orator ulung. Kehebatan Soekarno dalam orasinya mampu membangkitkan pesona dan memainkan emosi para pendengarnya. Idham Chalid yang lebih kalem dalam orasinya juga mampu membangkitkan semangat dan simpati para pendengarnya. Ia seorang yang diplomatis, selalu terlihat tenang, dan seringkali membuat orang yang marah menjadi tidak berkutik. Greg Fealy mencatat bahwa kepribadian dan gaya kepemimpinannya sebagai seorang yang ahli dalam berkomunikasi, punya banyak lelucon, dan sangat pandai membaca suasana hati pendengarnya. Kemampuannya menyenangkan hati dan menggerakkan massa, membuatnya menjadi salah satu pembicara NU yang paling populer. Pidato-pidatonya merupakan perpaduan dari khutbah keagamaan, dongeng, propaganda politik yang selalu disampaikan dengan cara yang menyejukkan dan penuh kerendahan hati.[29]

Selain beberapa kesamaan tersebut, seperti halnya kebanyakan orang NU dan mayoritas rakyat Indonesia yang memiliki kekaguman dan rasa hormat yang besar terhadap Presiden Pertama RI, dalam konteks politik hal ini tidak serta merta menjadi faktor utama yang menyebabkan Idham Chalid lebih bersepakat dan mendukung semua gagasan Soekarno. NU terlepas dari rasa hormat dan kekaguman para tokohnya kepada Soekarno, tidak akan

[28] *Ibid*, 52.
[29] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan dukungan politiknya kepada presiden tersebut bila tidak mendapatkan keuntungan.[30] Idham Chalid menjadi pendukung Soekarno terutama pada masa Demokrasi Terpimpin, semata-mata demi menjaga agar NU dan dirinya bisa terus bermain di tengah arus politik, sekalipun bukan menjadi pemain utama bahkan nyaris terhimpit di antara kekuatan utama Soekarno, PKI dan militer. Pada masa itu, Idham Chalid menduduki posisi sebagai anggota DPA, Front Nasional dan wakil ketua MPRS.

Pada peristiwa G30S/PKI, ketika posisi Soekarno dipertanyakan, Idham Chalid masih setia kepada Sekarno sehingga ia harus berhadapan dengan aktivis muda NU yang membenci sikap akomodatifnya. Aktivis muda NU ini berperan banyak dalam pembantaian massal terhadap PKI, dan memiliki kecenderungan untuk memuluskan transisi menuju Orde Baru. Hanya pada saat-saat terakhir ketika Soekarno "keras kepala" untuk mempertahankan komunis dan tampak tidak bersimpati pada korban kudeta, perubahan politik nampaknya bertiup kencang meninggalkan Soekarno. Pada saat itulah Idham Chalid terpaksa meninggalkannnya dan mempertahankan NU melewati transisi kekuasaan menuju Orde Baru.[31]

Idham Chalid mampu mempertahankan posisinya di pemerintahan dan berbagai Lembaga Negara sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Peran aktifnya bersama Rais Am Kiai Wahab Hasbullah sebelum NU menjadi partai politik tahun 1950-an, juga turut mewarnai langkah perjuangan Idham

[30] *Ibid*, 177.
[31] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ulama dan politisi. Idham Chalid memiliki sikap dinamis dan progresif, menghargai kemajuan dan bahkan berkarakter manusia modern, terpelajar dan memiliki pergaulan sangat luas karena menguasai bahasa asing. Demikian pula dalam berpolitik, ia bukanlah orang yang oportunis sebagaimana sejumlah tuduhan kepadanya, hanya karena karakternya yang memang *low profile* sebagaimana orang Banjar. Duet antara Rais Am Kiai Wahab yang memiliki karakter *high profile*, gigih dan pendobrak Kiai Idham Chalid yang *low profil* dan lemah lembut merupakan duaet yang ideal. Kepemimpinan Idham Chalid dalam NU maupun sebagai politisi banyak dipengaruhi oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Abdul Wahid Hasyim, yang selalu Idham Chalid sebut sebagai gurunya.[32]

Ketika NU secara resmi menyatakan keluar dari Masyumi pada tahun 1952, Idham Chalid sebagai ketua partai Masyumi juga lebih memilih NU dan ikut keluar dari Masyumi. Disaat NU memilih keluar dari Masyumi, disaat itulah NU benar-benar memulai langkah perjuangannya kembali mulai dari tingkatan paling bawah. Tetapi Idham Chalid tidak memilih tetap di Masyumi, sedangkan pada waktu itu jika ia memilih tetap di Masyumi, maka jabatannya akan tetap dipertahankan bahkan ia akan menjadi orang nomer satu di Masyumi. Di sini dapat dilihat bahwa Idham Chalid bukanlah seseorang yang penggila jabatan. Kemudian, ketika NU menjadi partai dan mengikuti pemilu tahun 1955, NU mendapatkan peringkat ketiga setelah PNI

[32] Arief Mudatsir Mandan (ed), *Napak Tilas*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Masyumi, Idham Chalid dipilih menjadi anggota DPR dari fraksi partai NU.

Para pengeritiknya menganggap bahwa Idham Chalid tidak layak dan tidak memiliki prinsip. Mengenai sikap keluwesan Idham Chalid, merupakan ciri khas yang mewarnai NU terutama diakhir tahun 50-an hingga 60-an, yang selalu mendasarkan keputusannya pada prinsip hukum Islam, diantaranya, *mā lā yudraku kulluh lā yuthraku kulluh* (kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semua), *dār al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* (mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan ketimbang meraih kemaslahatan), *idzā ta'āradha mafsadatāni ru'iya a'zamuhumā dharāran bi irtikābi akhaffihima* (apabila terjadi kemungkinan kompilasi bahaya maka dipertimbangkan bahaya yang palig besar resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya).[33] Dalam keputusannya menerima gagasan Manipol Usdek-nya Soekarno, karena tidak ingin nasibnya sama dengan dibubarkannya Masyumi dan PSI, sejumlah kritik menghantam bahwa NU terlalu kelewat hati dalam mengambil keputusan. NU cenderung memakai politik "kenyal" atau "jalan luwes" yang menyebabkan pamor partai politik Islam ini menurun. Hal ini tentu saja yang dikehendaki oleh Soekarno.[34]

[33] Ali Haidar, *Nahdlatu Ulama Dan Islam di Indonesia*, 363-369.
[34] Imam Ibnu Hajar, "Islam Politik Di Era Orde Lama Dan Orde Baru: Telaah atas Aksi dan Reaksi Tokoh-tokoh Islam" (Majalah Al-'Adalah, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol 10 No. 1, April 2007), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mitsuo Nakamura dalam observasinya pada Muktamar NU ke-26 di Semarang tahun 1979, menyebutkan bahwa Idham Chalid dalam menghadapi beberapa kritikan dari para pengurus cabang NU mengenai kepemimpinannya, ia hanya menunjukkan sikap pasrah dan banyak meminta maaf kepada para ulama yang telah menganggap banyak terjadi kesalahan selama kepeimpinannya. Hal ini sangat berbeda dengan KH. Ahmad Syaichu, sebagai Ketua I PBNU yang menanggapi kritikan para pengurus cabang NU dengan menunjukkan sikap politisi sekular yang terlihat amat angkuh. Pada sisi lain, Idham Chalid berbicara seperti seorang wakil dari para fungsionaris pelayanan pusat dan tampak berbicara sesuai etos tradisional NU dengan menunjukkan penghormatan yang besar kepada ulama daerah. Sedangkan KH. Ahmad Sjaichu menantang tradisi dan mencoba mengangkat dirinya pada posisi seorang pemegang komando utama.[35] Atas sikap itulah, Idham Chalid mampu mendapat simpati dari para pengurus cabang NU dan berhasil terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU tahun 1979.

Pada pemilu 1971, ketika NU mendapat peringkat kedua setelah Golkar, Idham Chalid diangkat menjadi Ketua DPR-MPR. Tahun 1973, Presiden Soeharto memberlakukan fusi partai yang mengharuskan partai-partai Islam untuk bersatu. Penggabungan empat partai Islam (NU, PSII, Parmusi dan Perti) ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dimana NU diantara sesame partai Islam lebih dominan, maka Idham Chalid dipilih

[35] Mitsuo Nakamura, *The Radical Traditionalism Of The Nahdlatul Ulama In Indonesia*: *A Personal Account Of The 26th National Cpngress, June 1979,* Semarang (Kyoto University, Southeast Asian Student, Vol. 19 No. 2 September 1981), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Presiden Partai. Sedangkan ketua umumnya adalah HMS. Mintaredja, seorang modernis dari Parmusi. Keterlibatan NU dalam PPP sejak awal diwarnai oleh kekecewaan karena dalam pembagian kursi DPR, NU hanya diberi jatah 44% dibawah Parmusi. Namun hubungan NU dan PPP mulai terlihat retak menjelang Pemilu 1982 ketika DPP-PPP tidak mencantumkan nama orang-orang NU pada calon anggota DPR. Atas peristiwa ini Idham Chalid selaku Ketua Umum PBNU dan Presiden Partai PPP adalah pihak yang banyak disalahkan oleh warga NU. Idham Chalid dituduh kurang gigih, bahkan dianggap terlalu bersikap mengalah pada unsur Parmusi dalam penyusunan daftar calon DPR.[36] Idham Chalid pun berada dalam posisi yang serba sulit. Beberapa pihak mulai mengemukakan keluhan terhadap kepemimpinan Idham Chalid karena ia dianggap kurang perhatian sebagai pengemban amanat Muktamar NU sebagai Ketua Umum PBNU.

Keretakan antara NU dan PPP, ternyata memicu permasalahan baru dalam tubuh NU sendiri. Kekecewaan NU terhadap PPP dan Idham Chalid selaku Presiden Partai PPP sekaligus Ketua Umum PBNU, membuat Idham Chalid banyak diperbicangkan dimana-dimana. Di tambah lagi sejak peristiwa tersebut, Idham Chalid tidak pernah muncul di kantor PBNU, serta Program Dasar 5 Tahun Pengembangan NU hasil keputusan Muktamar NU di Semarang belum dijalankan sama sekali. Kekecewaan terhadap Idham Chalid mendorong pengurus Syuriah dibawah pimpinan Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk mengemukakan keluhan terhadap kepemimpinannya. Sebagai

[36] Tempo, "Idham Chalid Bertahan Atau Mundur?" (No. 27 Thn. XII, 4 September 1982), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengemban amanat Muktamar NU, Idham Chalid di anggap sudah tidak mungkin lagi melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Umum PBNU. Pada tanggal 2 Mei 1982, Idham Chalid menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum PBNU di rumahnya dan di saksikan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Makhsum, Kiai Masykur dan Kiai Machrus Ali. Perang pernyataan tentang respon pengunduran Idham Chalid, terutama antara pendukung Idham Chalid dan warga NU belum mereda. Mereka dikejutkan lagi pada tanggal 14 Mei 1982, Idham Chalid mengeluarkan pernyataan pencabutan pengunduran dirinya. Namun, pernyataan ini tidak mendapatkan respon dari para ulama dan pengurus Syuriah NU. Banyak pernyataan muncul mengenai status Idham Chalid dan Ketua Umum PBNU. Dari pihak Idham Chalid, setelah pernyataan pencabutan dirinya kembali, ia masih menganggap bahwa Ketua Umum PBNU masih berada di tangannya. Namun, dari pihak ulama dan pengurus Syuriah, sejak Idham Chalid menandatangani surat pengunduran dirinya dengan disaksikan oleh para Kiai dirumahnya tanggal 2 Mei 1982, itu adalah sah lepasnya jabatan Ketua Umum PBNU dari tangan Idham Chalid dan diambil alih oleh KH. Ali Makhsum selaku Rais Am PBNU sebelum Muktamar NU tahun 1984. Pada Muktamar NU tahun 1984, para ulama Syuriah dibawah pimpinan Kiai As'ad Syamsul Arifin menunjuk KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU. Di antara keputusan Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembalinya NU ke Khittah 1926 yang salah satu aspeknya adalah mengembalikan kewibawaan, peran, fungsi dan otoritas ulama. [37]

Pada awal tahun 1980-an, regim Orde Baru di bawah Soeharto memaksa NU mengambil pilihan yang jelas antara oposisi atau akomodasi. Semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan diharuskan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal yang mengesampingkan Islam maupun pandangan-pandangan dunia lain. Lantaran tantangan politik berupa tekanan-tekanan pemerintah Orde Baru, NU harus merespon dengan mengambil keputusan-keputusan yang dipandang strategis demi masa depan bangsa. Meski pada tahun 1982 peran Idham Chalid selaku Ketua Umum PBNU mulai berkurang, namun peran NU terhadap pemerintahan harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Ketika pemberlakuan asas tunggal Pancasila oleh Presiden Soeharto tahun 1983, pengambilan keputusan NU diprakarsai oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin yangmenemui Presiden Soeharto untuk mengkonfirmasi sekaligus mempertegas kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan agama sebagai dasar kehidupan. Kemudian PBNU membentuk tim yang terdiri dari Kiai Ali Makhsum, Kiai Mahrus Ali, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Achmad Shiddiq, dan Kiai Masykur untuk menyepakati dan menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi NU. Kiai Achmad Shiddiq mendapat amanat untuk membuat kajian dan rumusan yang terkait dengan kesepakatan penerimaan asas tunggal Pancasila. Dengan usaha keras selama dua bulan, rumusan yang tebalnya 34 halaman itu selesai dan

[37] Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipresentasikan pada Munas Alim Ulama 1983. Kiai Achmad Shiddiq berhasil meyakinkan para kiai dan peserta Munas untuk menyetujui dokumen hubungan Islam dan Pancasila dengan argumen bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan butir-butir dalam Pancasila adalah wujud dari nilai-nilai Islam.[38]

Keputusan-keputusan yang diambil NU tidak semata-mata karena respon terhadap tantangan sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat Muslim, tetapi dalam hal tertentu juga karena tantangan politik yang mengharuskan NU bersikap sesuai dengan keinginan pemerintah.[39] Ketika NU secara formal menerima asas tunggal Pancasila, perubahan ini memperlihatkan kemampuan NU untuk tidak hanya terpaku pada tradisi keagamaan dan sejarahnya, tetapi juga mampu menyesuaikan tantangan perubahan zaman. NU menerima Pancasila bukan dalam pengertian politik, tetapi lebih karena pemahaman hukum Islam.[40]

Perubahan sikap politik NU berkenaan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, dari konfrontatif menjadi akomodatif, menggambarkan adanya proses dan fungsi yang dilaluinya sesuai dengan tuntutan situasional. Para elite politik NU yang menanamkan sosialisasi politik melalui proses

---

[38] Satrio Arismunandar, "Kiai Achmad Shiddiq dan Asas Tunggal Pancasila (Sang Penerobos)", dalam http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2015/06/kiai-achmad-shiddiq-dan-asas-tunggal.html?m=1 (4 Juni 2015).

[39] Mujammil Qomar, *NU "LIBERAL" : Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam* (Bandung : Mizan, 2002), 106.

[40] Ali Mas'ud, "Aspirasi Politik Nahdlatul Ulama: Telaah Terhadap Perilaku NU Pasca Kemerdekaan" (Jurnal Media Komunikasi dan Informasi Keagamaan, Edisi XV, April-Juni 1999), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi sosial yang berlangsung baik secara kultural maupun struktural, membawa NU pada realitas politik yang seringkali dinilai sangat dilematis.[41]

Selain itu, Mitsuo Nakamura juga mengeritik bahwa NU adalah sebuah gerakan tradisionalisme radikal, didasarkan pada beberapa sikap dan tindakan NU sebagai organisasi dan partai politik. *Pertama,* organisasi NU radikal berkenaan dengan akar atau dasar-dasar pondasi utamanya. Organisasi NU terstruktur berdasarkan asas otonomi dan memiliki watak mandiri, berdiri sendiri, dan membentuk etos pesantren yang mewarnai organisasi NU. *Kedua,* ketika NU melihat situasi di luar bergerak dalam arah yang sama dengan situasi yang diambilnya, ia akan mengambil langkah adaptif atau "oportunis" *vis-à-vis* situasi diluarnya. Sedangkan, bila ia melihat lingkungan diluarnya bergerak menuju arah yang berlawanan dari arah yang ditujunya, ia secara radikal akan kritis terhadap lingkungan di luarnya itu. Dengan demikian sikap NU memang selektif. *Ketiga,* NU bersifat tradisional dalam arti kehidupan beragama, transmisi nilai-nilai keagamaan melalui tradisi kesarjanaan dan pendidikan. Akan tetapi, tradisionalisme NU dalam bidang keagamaan bisa menyesuaikan diri terhadap realitas sosial yang dihadapi. Bentuk transmisi bisa jadi tradisional, tetapi apa yang ditransmisikan bisa radikal. Inilah salah satu alasan bahwa tradisionalisme NU tidak menghalangi radikalismenya, melainkan justru meningkatkan radikalisme organisasinya

[41] Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik NU : Pergulatan Pemikiran Politik Radikal Dan Akomodatif* (Jakarta : LP3ES, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menggalakkan sikap radikal politiknya dalam merespon situasi-situasi tertentu.[42]

Dari ketiga aspek tersebut, Nakamura menyimpulkan bahwa keyakinan NU pada tradisi Sunni menopang otonomi ulama dan memperkuat tradisi ini dalam struktural organisasi NU. Tradisionalisme keagamaan meningkatkan radikalisme organisasai dan membuatnya bertingkah selektif secara situasional, yakni adaptif atau radikal *vis-à-vis* lingkungan politik eksternal.[43]

Ketika kepemimpinan Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU mulai surut pada tahun 1982, namun dalam pemerintahan Presiden Soeharto ia masih menjabat sebagai Ketua DPA RI, Anggota BP-7, dan Anggota Dewan Pertimbangan MUI. Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, ia tetap dipercaya dan diangkat sebagai Mustasyar PBNU. Tahun 1985, sebagai Mudir 'Am Jam'iyyah Ahlith Thariqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah.

[42] Mitsuo Nakamura, *The Radical Traditionalism Of The Nahdlatul Ulama In Indonesia*: *A Personal Account Of The 26th National Cpngress, June 1979,* Semarang (Kyoto University, Southeast Asian Student, Vol. 19 No. 2 September 1981), 200.
[43] *Ibid*, 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis berikan dari uraian dan pembahasan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. KH. Idham Chalid lahir di Setui, Kalimantan Selatan pada tanggal 5 Januari 1922 dari seorang ayah yang bernama Muhammad Chalid dan ibunya Hj. Umi Hani. Di NU mulai aktif dalam Gerakan Pemuda Anshor dan menjadi Sekjen PBNU (sejak 1952), kemudian menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 1956-1984. Pada masa Orde Lama pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957). Masa Orde Baru, pernah menjabat sebagai Menteri Kesra (1966-1967), dan di parlemen sebagai Ketua DPR MPR (1971-1977). Di partai PPP sebagai Presiden Partai, dan sebagai ketua DPA (1978-1983), dan menjadi Anggota BP-7 dan Dewan Pertimbangan MUI (1984-1985).
2. NU memainkan peran besar dalam perpolitikan Indonesia sejak pemilu 1955. Pada masa Orde Lama, NU menyatakan sebagai pendukung Demokrasi Terpimpin Soekarno dan menyatakan keikutsertaannya dalam DPR-GR meski keputusan tersebut banyak mendapatkan perdebatan di kalangan ulama NU. Pada masa Orde Baru, ketika Presiden Soeharto memberlakuan asas tunggal Pancasila, NU juga memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi maupun dasar Negara. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada prinsip fikih yaitu, *Dār al-mafāsid muqaddimun 'alā jalb al-maṣālih*, artinya menghindarkan terjadinya kerusakan terlebih dahulu dari pada mencari kebaikan. Idham Chalid dan NU lebih memilih jalan tengah dalam merespon kebijakan pemerintah. Karena jika sebaliknya, NU lebih memilih memberontak kepada pemerintah, maka nilai itu akan bertentangan dengan tradisi Sunni yang selama ini dipertahankan. Hal inilah yang membuat posisi NU dalam pemerintahan semakin kuat. Sebaliknya, pemerintahan juga mengakui bahwa peran orang-orang NU tidak dapat dipisahakan dari berjalannya sistem pemerintahan.

3. Dalam berpolitik, *pertama*, NU lebih menekankan bersikap hati-hati, luwes dan memilih jalan tengah untuk menghindari sikap memusuhi dan konfrontasi. *Kedua*, menempatkan kekuasaan sebagai penentu utama dalam memilih strategi. Karena memberontak terhadap kekuatan yang lebih besar akan merugikan Islam. *Ketiga*, NU menggunakan pendekatan partisipasionis terhadap pemerintah menggunakan politik dengan ikut andil dalam pemerintahan. Selain itu, pandangan serba fikih dalam tradisi Sunni yang dijadikan sebagai pedoman NU. Sikap keluwesan Idham Chalid dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada prinsip hukum Islam yang sering menampilkan watak NU lebih akomodatif dan fleksibel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan skripsi dengan judul Dinamika Sejarah Politik NU : Studi Tentang Hubungan NU Dan Negara Pada Masa Dr. KH. Idham Chalid Tahun 1956-1984 M masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis berharap dengan penelitian yang sederhana ini bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada jurusan Sejarah Peradaban Islam khususnya, dan UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya.
2. Selain hal itu, penulis juga berharap bagi masyarakat umum atau para pembaca skripsi tentang Dinamika Sejarah Politik NU : Studi Tentang Hubungan NU Dan Negara Pada Masa Dr. KH. Idham Chalid Tahun 1956-1984 M ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sejarah perpolitikan islam di Indonesia. Skripsi ini tidak berarti apa-apa melainkan jika para pembaca skripsi ini dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari skripsi ini. Selama ini yang diketahui bahwa perilaku politik NU dan Idham Chalid cenderung oportunis terhadap pemerintah, sehingga tidak sedikit yang menganggap bahwa NU tidak memiliki pendirian, ditambah lagi dengan sosok Idham Chalid yang lentur dan luwes. Nyatanya, anggapan bahwa NU cenderung oportunis dan sikap keluwesan Idham Chalid dalam memimpin NU merupakan strategi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memudarkan nilai-nilai Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Buku

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penulisan Sejarah.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Adnan, H. Abdul Basit. *Kemelut Di NU: Antara Kiai Dan Politisi*. Solo : CV Mayasari, 1982.

Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik.* Terj. Setiawan Abadi. Jakarta : LP3ES, 1988.

Anam, Choirul. *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU.* Surabaya : PT Duta Aksara Mulia, 2010.

Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959.* Bandung : Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981.

Barton, Greg dan Fealy, Greg (ed). *Tradisionalisme Radikal : Persinggungan NU-Negara.* Yogyakarta : LKiS, 1997.

Brinessen, Martin Van. *NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.* Yogyakarta : LKiS, 1999.

Chalid, Idham. Parlemen, Organisasi Dan Tjaranja Bekerdja. Semarang : Astanabuku Abede, 1951.

Chalik, Abdul. *Nahdlatul Ulama Dan Geopolitik : Perubahan Dan Kesinambungan*. Yogyakarta: Pintal, 2011.

Feillard, Andree. *NU Vis-ā-vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna.* Yogyakarta : LKiS, 1999.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967.* Yogyakarta : LKiS, 2003.

Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama Dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik.* Sidoarjo: Al-Maktabah, 2011.

Ismail, Faisal. *Ideologi, Hegemoni Dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam Dan Pancasila.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, Faisal. *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur Dan Struktur*. Yogyakarta: LESFI, 2002.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 2011.

Mandan, Arief Mudatsir (ed). *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid : Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah.* Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2008.

Muhajir, Ahmad. *Idham Chalid : Guru Politik Orang NU* . Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.

Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama : Pergulatan Pemikiran Politik Radikal Dan Akomodatif.* Jakarta : LP3ES, 2004.

Nakamura, Mitsuo. *The Radical Traditionalism Of The Nahdlatul Ulama In Indonesia.* Kyoto University : Departemental Bulletin Paper, 1981.

Qomar, Mujamil. *NU "LIBERAL": Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam.* Bandung : Mizan, 2002.

Rifai, Muhammad. *KH. Wahab Hasbullah: Biografi Singkat 1888-1971*. Jogjakarta : Garasi House Of Book, 2010.

Ridwan. *Paradigma Politik NU : Relasi Sunni-NU dalam pemikiran Politik.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Sjamsuddin, Dr. Nazaruddin (ed). *Soekarno, Pemikiran Politik Dan Kenyataan Praktek.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2016.

Tempo. *Apa Dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982*. Jakarta : Grafiti Pers, 1981.

Zulaicha, Lilik. *Metodologi Sejarah I.* Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2005.

Jurnal dan Majalah

Hajar, Imam Ibnu. "Islam Politik Di Era Orde Lama Dan Orde Baru: Telaah atas Aksi dan Reaksi Tokoh-tokoh Islam", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol 10 No. 1 (2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'ud, Ali. "Aspirasi Politik Nahdlatul Ulama: Telaah Terhadap Perilaku NU Pasca Kemerdekaan", *Jurnal Media Komunikasi dan Informasi Keagamaan*, Edisi XV, April-Juni (1999).

Tempo, "Idham Chalid Bertahan Atau Mundur?". No. 27 Thn. XII, 4 September 1982.

Chalid, Idham. "Haluan Politik Negara", *Api Islam*, No. 6, 1 Agustus 1965.

Skripsi

Chumairoh, Siti. *NU Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila).* UIN Sunan Ampel Fakultas Adab Dan Humaniora, Surabaya. 2014.

Hidayat, Solihin. *Nahdlatul Ulama Setelah Kembali Ke Khittah 1926.* Skripsi IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab Dan Humaniora, Surabaya, 1989.

Hidayatullah, Rasyid. *Demokrasi Terpimpin Menurut KH. Idham Chalid Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*. UIN Sunan Ampel Fakultas Adab Dan Humaniora, Surabaya, 2011.

Mahmudi, Ahmad. *Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pembentukan Ideologi Negara Republik Indonesia.* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Yogyakarta, 2014.

Internet

Kompas.com. "Idham Chalid, Ulama dan Politisi Mumpuni di Pecahan Rp 5.000 Baru", https://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/19/213000126 (19 Desember 2016)

Muchlison Rochmat, "Beberapa Karya dan Penghargaan KH. Idham Chalid", dalam http://www.nu.or.id/post/read/89872 (NU Online, 03 Mei 2018).

Mugammad Subarkah, "Soal Telepon dari Pembantu Admiral Maeda", dalam https://m.republika.co.id/berita/selarung/suluh/16/06/21 (22 Juni 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukafi, "Mantan Ketua Umum PBNU KH. Idham Chalid Wafat", dalam http://www.nu.or.id/post/read/23722/ (NU Online, 11 Juli 2010).

Satrio Arismunandar, "Kiai Achmad Shiddiq dan Asas Tunggal Pancasila (Sang Penerobos)", dalam http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2015/06/kiai-achmad-shiddiq-dan-asas-tunggal.html?m=1 (4 Juni 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id